



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT PENGOLAHAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN
DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas organisasi kepada instansi terkait dan publik atas amanat dan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada KKP.

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholders sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan media akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban sebagai amanah yang diemban organisasi dan tanggung jawab pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Di samping itu, informasi perihal pengelolaan kegiatan dan sasaran organisasi diuraikan dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Landasan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP Tahun 2025 adalah Rancangan Rencana Strategis Ditjen PDSPKP Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 beserta realisasinya. Laporan ini memuat pula pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Kegiatan utama Direktorat Pengolahan yang mendukung program utama Ditjen PDSPKP yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%), (c) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%), (d) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton), (e) Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (f) Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Prociuk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen), (g) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (h) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (i) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat

Pengolahan (Persen), (j) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai), (k) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks). Nilai Capaian Organisasi pada periode pelaporan Tahun 2025 sebesar 101,71% (kategori baik). Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP.

Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca untuk memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkait sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 20 Januari 2026

Direktur Pengolahan



Ir. Tri Aris Wibowo, M.Si

Tim Penyusun

PENGARAH

Direktur Pengolahan

PENYUSUN

Tim penyusunan pelaporan Direktorat Pengolahan

KONTRIBUTOR

Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Lingkup Direktorat Pengolahan,
Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban pelaksanaan kinerja (*performance results*) Direktorat Pengolahan selama Tahun 2025, dikaitkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Sesuai dengan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Direktorat Pengolahan melakukan pengukuran terhadap kegiatan Pengolahan yang tercakup dalam program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan untuk mencapai 6 (enam) Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut: (1) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%); (2) Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton); (3) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); (4) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); (5) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai); (6) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks).

Sasaran kegiatan di atas selanjutnya ditetapkan dalam bentuk kontrak kinerja antara Direktur Pengolahan dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan terdiri dari 6 (enam) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dengan rincian 2 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 1 indikator kinerja bersifat triwulanan.

Indikator Kinerja Kegiatan yang bersifat tahunan Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Sedangkan indikator yang bersifat triwulan adalah Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan, Indikator yang bersifat semesteran adalah Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan, Volume Produksi Olahan Perikanan, Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan atas capaian dan akuntabilitas kinerja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025, enam (6) Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengolahan mencapai target yang telah

ditetapkan. Berdasarkan aplikasi kinerjaku, Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada periode pelaporan Tahun 2025 adalah sebesar 101,71% (kategori baik). Nilai tersebut diperoleh dari capaian kinerja yang targetnya ada pada Tahun 2025. Adapun rincian yaitu sebagai berikut :

- IKK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%); target 68,70%; capaian 68,72% (prognosa) atau 100,03% dari target.
- IKK Volume Produksi Olahan Perikanan; target 3,71 juta ton; capaian 3,783 juta ton (prognosa) atau 101,89% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 100%; capaian 100% atau 100% dari target.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 86,00; capaian 87,20 atau 101,40% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks); target 81,00; capaian 85,97 atau 106,14% dari target.

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-980/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan Perjanjian Kinerja tertanggal 8 Desember 2025, Direktorat Pengolahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 777.142.000,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 777.030.114,- atau setara dengan 99,99%. Pencapaian terhadap target sasaran kinerja bidang Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan yang telah dicapai selama Tahun 2025 serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi, diharapkan dapat menjadi salah satu acuan untuk merumuskan langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan di tahun selanjutnya. Dengan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 dan analisis yang komprehensif terhadap capaian sasaran yang dijabarkan dalam indikator-indikator utama yang telah dicapai Tahun 2025, diharapkan dapat dijadikan umpan balik dan acuan perencanaan berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
Tim Penyusun	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Maksud dan Tujuan.....	2
1.3.Tugas dan Fungsi	2
1.4.Keragaan Sumberdaya Manusia.....	4
1.5.Permasalahan Utama	4
1.6.Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
2.1.Rencana Strategis	7
2.2.Perjanjian Kinerja Tahun 2025	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	11
3.1.Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan	11
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja	13
Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	13
Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan.....	47
IK 2. Volume Produksi Olahan Perikanan.....	47
.....	52
.....	57
Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan	77
IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	78
IK 4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan	79
IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	80

IK 6. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	82
3.3. Realisasi Anggaran	83
BAB IV PENUTUP.....	85
4.1. Kesimpulan	85
4.2. Permasalahan dan Rekomendasi	86
4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025	86
4.4. Lampiran	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	9
Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025	12
Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	14
Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Volume Produksi Olahan Perikanan... Error! Bookmark not defined.	
Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	78
Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan.....	79
Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	81
Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	82
Tabel 10. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan Triwulan IV 2025.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan	4
Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia	4
Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025	6
Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian Tahun 2025 Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku	11
Gambar 5. Poklaksar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara.....	17
Gambar 6. Pelatihan pembinaan pengolahan dan ekspor untuk produk olahan hasil perikanan di Provinsi Bangka Belitung	18
Gambar 7. Workshop Peningkatan Kapasitas Pemindang Ikan Mitra Operator Holding UMKM Sektor Perikanan di Kab. Tegal	19
Gambar 8. Poklaksar Karya Sehat Utama, Kab. Bengkulu Tengah	20
Gambar 9. PT. Hidayat Bahari Sejahtera, Kota Tangerang Selatan	21
Gambar 10. Pembentukan Asosiasi Mikroalga Indonesia	22
Gambar 11. Pendampingan Pembinaan UPI Mikro Kecil Forum Maritim Bali	23
Gambar 12. Poklaksar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara.....	23
Gambar 13. PT. Gabungan Era Mandiri (GEM), Kota Jakarta Utara	24
Gambar 14. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Webinar atau Zoominar	25
Gambar 15. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu.....	27
Gambar 16. Diskusi Pemanfaatan Hasil Samping UPI Menengah dan Besar (UPI MB).....	28
Gambar 17. Rapat Tindaklanjut Penyusunan Modelling Ekonomi Sirkular Pemanfaatan Hasil Samping UPI	29
Gambar 18. Koordinasi Pemutakhiran Dashboard Data Direktorat Pengolahan	29
Gambar 19. Koordinasi Penguatan Operasional dan Strategi Pemasaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) Zero Waste.....	30
Gambar 20. Pembinaan Calon Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Alami Indah Bersinar	31
Gambar 21. Rapat Pembahasan Update Tindak Lanjut Temuan FDA terkait Radiokatif Cesium-137	32

Gambar 22. Pembinaan PT. Bintang Intan Gemilang Kabupaten Bintang	33
Gambar 23. Pembahasan Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/ <i>Hazard Analysis Critical and Control Point</i> (PMMT/HACCP)	35
Gambar 24. Pembinaan Pemenuhan PB UMKU Bagi UPI PMA.....	36
Gambar 25. Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemindaian Ulang Terindikasi Cesium 137 dan Rencana Pelimbahan	37
Gambar 26. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan	37
Gambar 27. Pembahasan Pengembangan Kompetensi Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Tahun 2026	38
Gambar 28. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha	40
Gambar 29. Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan.....	41
Gambar 30. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar	42
Gambar 31. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar	42
Gambar 32. Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025	43
Gambar 33. Kunjungan Lapang dalam Rangka Profiling Food Loss and Waste pada Unit Pengolahan Ikan	44
Gambar 34. Koordinasi Rencana Perluasan Berbagi Data dalam Rangka Penghitungan Utilitas	45
Gambar 35. Rapat Koordinasi Rencana Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026	46
Gambar 36. Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025)	47
Gambar 37. Rapat pembahasan rancangan Nota Kesepahaman antara BPJPH dengan KKP	50
Gambar 38. Rapat Teknis (RSNI2) CPGB dengan Metode Evaporasi Terbuka	51
Gambar 39. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman	52
Gambar 40. Rapat Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama Ditjen PDSPKP dan Sekretariat Utama BPJH	53

Gambar 41. Rapat Teknis Lanjutan RSNi2 CPBG dengan Metode Evaporasi Terbuka	53
Gambar 42. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Produk Perikanan Non Pangan	54
Gambar 43. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 2026 Produk Perikanan.....	55
Gambar 44. Rapat pembahasan draft PKS tentang Sertifikasi Halal Produk Kelautan dan Perikanan skala usaha mikro dan kecil	56
Gambar 45. Rapat Pembahasan Rancangan Permen KP Tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan Serta Pergaraman	57
Gambar 46. Survey lapangan ke Tambak Garam Rakyat di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pangkebon dan Kabupaten Jepara	58
Gambar 47. Rapat Teknis RSNi3 CPBG dengan Metode Evaporasi Terbuka 2025.	59
Gambar 48. Rapat Pembahasan Rancangan PKS Halal	60
Gambar 49. Pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indigeo di Kabupaten Magelang	62
Gambar 50. Pemantauan Penerapan SNI oleh UKM Perikanan di Kota Bogor	63
Gambar 51. Pemantauan Penerapan SNI di Kabupaten Cianjur	64
Gambar 52. Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)	65
Gambar 53. Rapat Koordinasi PNPS Mendesak 2026.....	66
Gambar 54. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG Sesi 1.....	67
Gambar 55. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) analisis kesiapan dan kapasitas wilayah dalam penyediaan susu untuk program MBG	68
Gambar 56. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG Sesi 2.....	69
Gambar 57. <i>Forum Group Discussion</i> (FGD) Pengembangan Kerangka Konseptual Analisis Proses Bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG).....	70
Gambar 58. Pembinaan UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan	70
Gambar 59. Sosialisasi Keamanan Pangan bagi SPPG	71
Gambar 60. Rapat Penyusunan Juknis Perhitungan Nilai Tambah	72
Gambar 61. Ngolah Ikan Bareng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).....	73
Gambar 62. Pembuatan design buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan tahun 2025 dan katalog resep workshop serta lomba	74

Gambar 63. Pembuatan Website/Aplikasi Perhitungan Nilai Tambah Produk Perikanan	75
Gambar 64. <i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Pemetaan Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Pasokan Bahan Pangan pada Program MBG.....	76
Gambar 65. Laporan Forum Group Discusion (FGD) Kebijakan, Strategi dan Roadmap Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ke Depan	77

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan hal yang tidak dapat kita hindarkan di era reformasi. Reformasi birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Pengolahan merupakan direktorat teknis di bawah Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang bertanggung jawab kepada Dirjen PDSPKP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan mengacu kepada Perjanjian Kinerja yang mengejawantahkan dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2025 - 2029 yang disusun sebagai acuan kegiatan dalam kurun waktu periode lima tahunan. Mendukung hal tersebut, Direktorat Pengolahan turut serta menyusun Perjanjian Kinerja yang mencakup turunan dari Renstra 2025-2029 dengan Indikator Kinerja Utama yaitu, (a) Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%), (b) Persentase Rancangan Standar Nasional Indonesia (SNI) Produk Perikanan yang Memenuhi Tahapan Proses Perumusan SNI (%), (c) Persentase Unit Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan yang dibina menuju penerapan kelayakan pengolahan dan/atau HACCP (%), (d) Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan (Juta Ton), (e) Persentase Pemanfaatan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (f) Persentase Pelaku Usaha yang dibina Menuju Penerapan Diversifikasi Prociuk dan/atau Kemasan Bernilai Tambah (Persen), (g) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (h) Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (i) Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Program Prioritas/Strategis di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen), (j) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai), (k) Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks). Berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Direktorat Pengolahan sebagai Entitas Akuntabilitas Kinerja berkewajiban menyusun perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja dan pengelolaan data kinerja, serta menyampaikan Laporan Kinerja yang merupakan wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban. Upaya mewujudkan akuntabilitas organisasi Direktorat Pengolahan Menyusun laporan Kinerja baik secara periodik triwulan maupun tahunan. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban organisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan pada indikator sasaran yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, maka Direktorat Pengolahan akan menyampaikan capaian realisasi kinerja dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2025 dengan menyusun “Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025”.

1.2.Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025 adalah:

1. Untuk melaporkan pertanggung jawaban kinerja kepada pemerintah dan publik;
2. Sarana evaluasi atas capaian kinerja dalam melaksanakan visi dan misinya, serta sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

1.3.Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 02/PERMENKP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengolahan hasil kelautan dan perikanan. Sebagai upaya dalam pelaksanaan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi,

diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemetaan dan analisis pengolahan hasil kelautan dan perikanan, pengembangan dan penerapan standardisasi, diversifikasi dan inovasi produk bernilai tambah, dan pembinaan pengolahan hasil kelautan dan perikanan, serta pembinaan mutu, keamanan, dan kualitas produk kelautan dan perikanan; dan
- f. pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pengolahan.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor B.1010/DJPDSPKP.4/KP.440/X/2025, Direktorat Pengolahan dipimpin oleh seorang Direktur yang membawahi 6 Tim Kerja dan 1 Kepala Subbagian Tata Usaha, sebagai berikut :

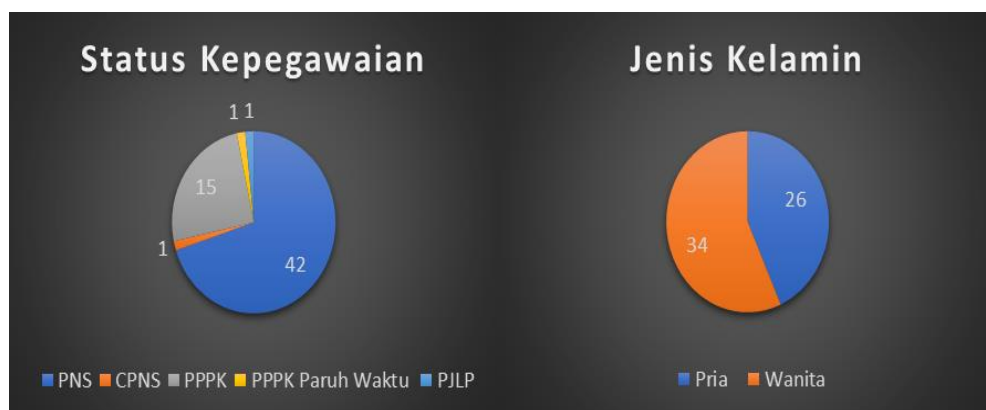
- a. Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan;
- b. Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk;
- c. Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan ;
- d. Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan;
- e. Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil;
- f. Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk;
- g. Kepala Subbagian Tata Usaha.



Gambar 1. Bagan Organisasi Direktorat Pengolahan

1.4. Keragaan Sumberdaya Manusia

Jumlah pegawai di Direktorat Pengolahan pada Tahun 2025 berjumlah 60 orang dengan komposisi 42 orang PNS, 1 orang CPNS, 15 orang PPPK, PPPK Paruh Waktu 1 orang, dan 1 orang PJLP. Jumlah komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin terdiri dari Pria sebanyak 26 orang dan Wanita sebanyak 34 orang. Sedangkan berdasarkan jabatan fungsional, jumlah Analis Mutu Hasil Perikanan Pertama sebanyak 1, Analis Pasar Hasil Perikanan Pertama sebanyak 9 orang, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sebanyak 27 orang, Penata Perizinan sebanyak 1 orang, Penata Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Pranata Keuangan APBN Terampil sebanyak 1 orang, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur sebanyak 1 orang.



Gambar 2. Keragaan Sumber Daya Manusia

1.5. Permasalahan Utama

Dalam pembangunan penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut berkaitan dengan produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), produksi ikan bersifat musiman, disparitas wilayah produksi dan industri, logistik dan konektivitas antar wilayah, industri pengolahan yang didominasi

skala mikro kecil, ketersediaan dan keterhubungan informasi produksi dan pasar, persyaratan, hambatan dan diplomasi perdagangan, serta SDM bidang pengolahan, mutu dan pemasaran ikan yang perlu ditingkatkan.

Terkait produk perikanan yang mudah rusak (*perishable product*), perlu dilakukan penanganan ekstra dalam penyajiannya. Ke depan, pembinaan terhadap unit pengolahan ikan (UPI) dalam penyediaan produk perikanan yang berkualitas perlu diperkuat, sehingga terjadi diversifikasi produk terutama dalam penyajiannya, serta pengujian mutu perlu dilakukan bertingkat. Di samping itu, sebagai upaya untuk memastikan keamanan produk perikanan yang diperdagangkan, penilaian sertifikasi perlu terus digenjut, terutama untuk UPI, pelaku pasar dan logistik perikanan yang berskala besar dan mempunyai jangkauan pasar yang luas. Hal ini penting, mengingat produk perikanan akan terus dibutuhkan masyarakat luas, selain karena bahan pangan ini rasanya enak dan ekonomis, juga mempunyai kandungan gizi yang tinggi.

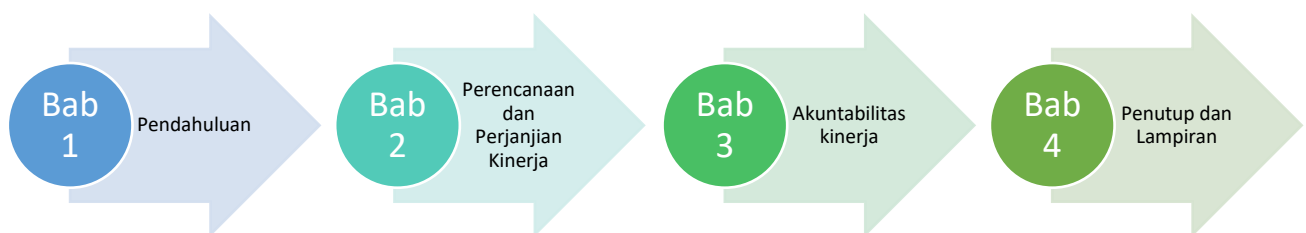
Tantangan berikutnya terjadi pada industri pengolahan ikan, dimana saat ini masih didominasi UPI berskala mikro kecil. Jumlahnya mencapai 81.350 unit, sementara UPI skala menengah dan besar hanya 1.475 unit (Direktorat Pengolahan, 2024). Akibatnya mereka kurang bisa bersaing terutama dalam pemodalan dan ekspansi usaha, meskipun kebijakan berpihak kepada mereka. Ke depan, UPI skala mikro kecil tersebut perlu dibina dan difasilitasi sehingga lebih berkembang dan meningkat kelasnya. Hal ini perlu dilakukan antara lain dengan memperbanyak inkubator bisnis produk KP yang nantinya bisa melatih UPI dalam pengembangan produk dan memfasilitasi UPI untuk naik kelas. Upaya berikut perlu dilakukan adalah fasilitasi akses pembiayaan usaha dan fasilitasi kemitraan usaha, sehingga membantu perluasan usaha dan jaringan kerjasama UPI.

Kualitas SDM bidang pengolahan, pengetahuan tentang mutu dan dinamika pasar menjadi permasalahan dan tantangan lain yang harus dipecahkan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan, terutama di pasar ekspor. Saat ini baru tersedia 190 Pembina Mutu dan 264 Analis Pasar Hasil Perikanan di seluruh Indonesia, padahal posisinya sangat vital sebagai pelopor mutu dan pengembangan pasar terutama di wilayah Indonesia yang aksesnya terbatas. Pembina Mutu dan Analis Pasar akan menjembatani penyediaan produk kelautan dan kelautan yang berkualitas dengan jaringan logistik dan pasar potensial di dalam dan luar negeri. Dalam konteks pengembangan SDM pengolahan, pelaku UPI perlu ditransfer

knowledge berkaitan dengan standar mutu (GMP, SSOP, HACCP, *Traceability*) dan informasi pasar sehingga terjadi konsistensi dalam penyediaan produk KP berkualitas yang dibutuhkan pasar. Pembina Mutu dan Analis Pasar membantu hal tersebut di lapangan, sementara pada lingkup yang lebih luas Ditjen PDSKP dapat mengakomodasinya, melalui pengembangan sertifikasi kesesuaian mutu, fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran, fasilitasi promosi dan pameran produk KP, serta fasilitasi kesepakatan pemasaran produk KP di pasar potensial dalam dan luar negeri

1.6. Sistematika Penyajian

Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan dokumen informasi pelaksanaan program dan kegiatan dan pencapaian kinerja Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu selama Tahun 2025. Pencapaian Kinerja (*Performance Results*) Tahun 2025 yang terealisasi dibandingkan dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan identifikasi sejumlah kesenjangan kinerja (*Performance Gap*) untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025 diilustrasikan dalam bagan berikut ini :



Gambar 3. Sistematika Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1.Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk tahun 2025-2029. Rencana strategis merupakan arah organisasi dan seluruh pegawai di dalamnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan mandat yang diterima. Rencana strategis yang disusun berlandaskan pada visi yang telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Visi KKP, yaitu:

”Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Misi KKP :

1. Menjaga Keberlanjutan Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
2. Mengembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan Sebagai Penggerak Utama Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan
3. Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Tujuan KKP :

1. meningkatnya efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
2. meningkatnya produktivitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan serta pembangunan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdaya saing;
3. meningkatnya kompetensi SDM kelautan dan perikanan; dan
4. meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas.

Sedangkan Rancangan Visi Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan:

“Terwujudnya Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebagai Pilar Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan”.

Rancangan Misi DJPDS :

1. Mengembangkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berkualitas

Rancangan Tujuan :

1. Meningkatkan akses pasar produk kelautan dan perikanan di pasar dalam dan luar negeri serta usaha pengolahan dan pemasaran.

Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:

- a. Target Indikator Nilai Ekspor Rumput Laut tahun 2025 sebesar USD 574 juta dan meningkat sebesar USD 898 juta pada tahun 2029,
 - b. Target Indikator Nilai Ekspor Perikanan lainnya tahun 2025 sebesar USD 5,68 miliar dan meningkat sebesar USD 7,60 miliar pada tahun 2029,
 - c. Target Nilai Pemasaran Produk Perikanan Dalam Negeri tahun 2025 sebesar Rp 310,51 triliun dan meningkat sebesar Rp 352,01 triliun pada tahun 2029,
 - d. Target Persentase UMKM Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan Naik Kelas tahun 2025 sebesar 5% dan meningkat sebesar 7% pada tahun 2029.
2. Mewujudkan tata kelola birokrasi yang efisien, profesional, dan berorientasi hasil dalam mendukung penguatan daya saing sektor kelautan dan perikanan.
Pencapaian tujuan ini ditandai dengan:
Target Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Lingkup Ditjen PDSPKP tahun 2025 sebesar 86 dan meningkat sebesar 88 pada tahun 2029.

Sasaran Strategis :

1. SS-3 Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Pasar Domestik dan Internasional
2. SS-5 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Berkualitas

Program :

1. Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
2. Dukungan Manajemen

Sasaran Program :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan yang berdaya saing

2. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Penetapan kinerja merupakan penjabaran target kinerja yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Penetapan kinerja ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Target kinerja ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk indikator kinerja tingkat sasaran maupun indikator kinerja tingkat kegiatan (input, output, dan outcome). Rencana kinerja yang ditetapkan pada setiap tahun merupakan rumusan yang direncanakan berdasarkan rencana strategis untuk kurun waktu 2025-2029. Uraian indikator kinerja yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

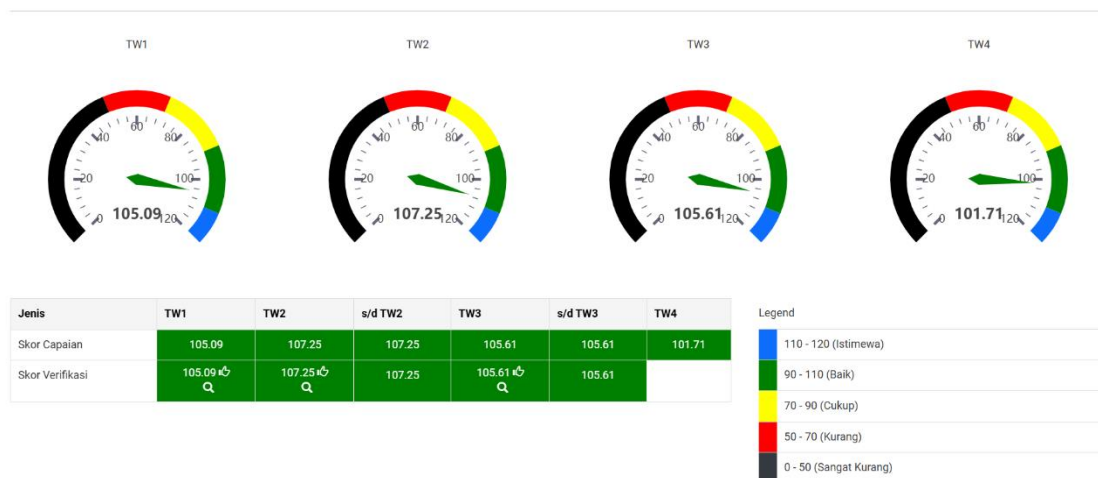
No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,70
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2.	Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan		Target Tahun 2025
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		6.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Nilai Kinerja Organisasi Pada Periode Pelaporan Tahun Berjalan

Direktorat Pengolahan memiliki 6 indikator kinerja yang terdiri dari 2 indikator kinerja bersifat tahunan, 3 indikator kinerja bersifat semesteran, dan 1 indikator kinerja bersifat triwulanan. Nilai pencapaian NKO Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerjaku pada Tahun 2025 sebesar 101,71. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 1,282 poin atau -1,24%. Penurunan Nilai Capaian 2025 dikarenakan berkurangnya 5 IKU dan munculnya 1 IKU baru.



Gambar 4. Layar tangkap dashboard nilai capaian Tahun 2025 Direktorat Pengolahan pada aplikasi kinerjaku

Tabel 2. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi TW IV 2025	% Terhadap Target	
			Target Tahun 2025	TW IV		Tahun 2025	TW IV 2025
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,70	68,70	68,72	100,03	100,03
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2. Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71	3,71	3,78	101,89	101,89
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	95,00	95,00	100,00	105,26	105,26
		4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100	100	100	100	100
		5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86,00	86,00	87,20	101,40	101,40

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target		Realisasi TW IV 2025	% Terhadap Target	
			Target Tahun 2025	TW IV		Tahun 2025	TW IV 2025
		6. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81,00	81,00	85,97	106,14	106,14

3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

IK 1. Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Realisasi produksi atau volume produk olahan dibandingkan dengan kapasitas terpasang pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Menengah dan Besar. Capaian persentase utilitas pada periode penghitungan merupakan angka prognosa. Capaian akhir persentase utilitas tersedia pada T+1.

Tabel 3. Ikhtisar Pencapaian Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Pertumbuhan year on Year
Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (%)	2025	68,70	68,72*	100,03*	68,70	69,50	68,72	100,03	98,88	0,67
	2024	68	68,26	100,38						-0,10
	2023	68	68,33	100,49						1,99
	2022	67	67	100,00						3,27
	2021	66	64,88	98,30						

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Persentase Utilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI)* Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil. Pada Tahun 2021, realisasi tercatat sebesar 64,88% atau 98,30% terhadap target. Pada Tahun 2022, realisasi meningkat menjadi 67,00% atau 100,00% dari target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 3,27% dibandingkan Tahun 2021. Tren peningkatan berlanjut pada Tahun 2023 dengan capaian sebesar 68,33% atau 100,49% dari target, serta pertumbuhan year-on-year sebesar 1,99%. Pada Tahun 2024, realisasi tercatat sebesar 68,26% atau 100,38% terhadap target, namun secara year-on-year mengalami kontraksi tipis sebesar -0,10% dibandingkan Tahun 2023. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 68,72% atau 100,03% terhadap target tahunan, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 0,67%.

Secara kumulatif terhadap Target Renstra Tahun 2025 sebesar 68,70%, realisasi hingga Tahun 2025 telah mencapai 100,03%, sehingga target strategis jangka menengah dapat dinyatakan telah tercapai. Sementara itu, terhadap Target Renstra Tahun 2029 sebesar 69,50%, capaian hingga Tahun 2025 (prognosa) telah mencapai 98,88%, yang menunjukkan bahwa indikator kinerja berada dalam kondisi on track menuju pemenuhan target akhir periode perencanaan. Secara keseluruhan, kinerja Persentase Utilitas UPI selama periode 2021–2025 menunjukkan konsistensi

pencapaian di atas target tahunan, dengan pertumbuhan year-on-year yang positif pada sebagian besar tahun dan fluktuasi yang sangat terkendali.

Alokasi anggaran IK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan gabungan dari empat kegiatan (RO) mengacu pada dokumen rencana evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan ada empat kegiatan, yaitu Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Skala Menengah dan Besar, Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Dibina, Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan Bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil KP Skala Mikro dan Kecil, dan Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan. Indikator kinerja Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan mendapatkan pagu sebesar Rp 422.164.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Tahun 2025 sebesar Rp 422.119.918,- atau sebesar 99,99% dari pagu anggaran pasca blokir. Efisiensi anggaran IK tersebut adalah realisasi IKU sebesar 100,3% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,99% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,04%.

Faktor Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah data VPO triwulan 3 masih perlu dilakukan analisis keakuratan untuk mendapatkan nilai VPO, masih terbatasnya data pihak penerima pemanfaatan produk sampling yang dihasilkan dari UPI, dimana data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu referensi pelaksanaan profiling *food loss and waste* (FLW). Yang menjadi faktor keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pada triwulan IV adalah telah dilakukan cleansing awal data VPO Tw 3 sebagai referensi awal hasil analisis perhitungan VPO, pendataan profiling FLW telah dilakukan secara bertahap. Rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan kedepannya, yaitu melakukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi tren dan anomali data, guna mendukung akurasi dan validitas penghitungan VPO dan melakukan koordinasi lanjutan dengan UPI dan Dinas dalam pendataan profiling FLW.

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, telah dilaksanakannya pendampingan lanjutan penerapan GMP, SSOP, dan sertifikasi bagi UPI skala mikro dan kecil yang telah menunjukkan progres pembinaan, replikasi dan validasi teknologi pengolahan seperti *Solar Dryer Dome* (SDD) untuk peningkatan mutu dan efisiensi produksi serta kemasan, percepatan dan penuntasan pendataan Volume Produk Olahan (VPO) melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta

konsolidasi hasil pembinaan ke dalam perencanaan kebijakan dan pengembangan standar.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

A. Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil yang Dibina

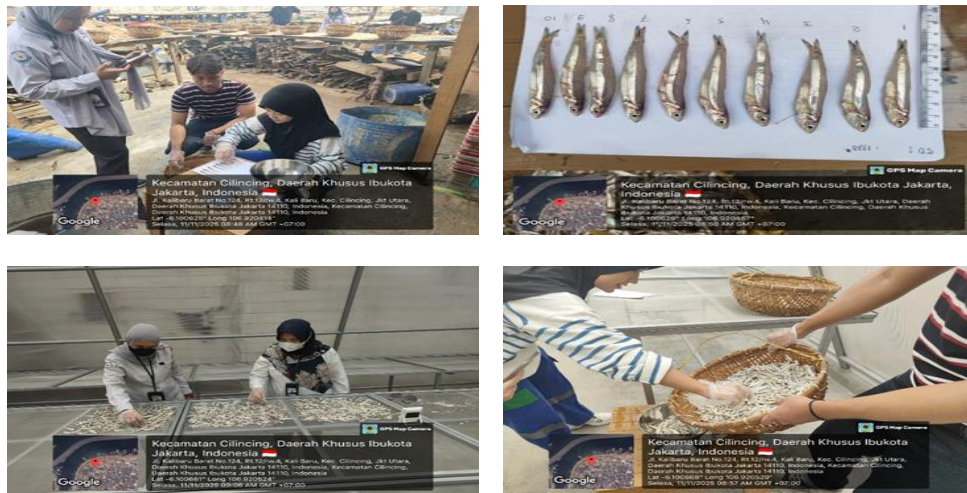
Kegiatan Pembinaan Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil merupakan bentuk usaha pembinaan terkait kelayakan dasar pengolahan bagi UPI skala mikro dan kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait pentingnya jaminan mutu dan keamanan pangan bagi masyarakat dan pelaku usaha bidang perikanan. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 335 Industri dengan target 335 Industri. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan UPI Mikro dan Kecil, yaitu:

1. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil

a. Poklahsar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 November dan 24 Desember 2025 di Poklahsar Bersama Maju, Kel. Kalibaru. Kegiatan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Pengolahan Hasil dan Taruna Politeknik Ahli Usaha Jakarta, serta didampingi oleh Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Jakarta Utara. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Dalam rangka tindak lanjut kegiatan Pendampingan pengolahan produk menggunakan *Solar Drayer Dome* (SDD) di Poklahsar Bersama Maju, Kel. Kalibaru, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan telah melaksanakan uji coba efektifitas penggunaan SDD. Dari hasil pada uji coba penggunaan SDD pada proses pengeringan maka didapatkan bahwa Ikan asin teri jengki, yang dikeringkan menggunakan SDD selama 6 jam menghasilkan susut bobot dibawah 50%, dari hasil tersebut untuk mengetahui tingkat kekeringan sesuai dengan SNI ikan asin kering maka akan dilakukan pengujian parameter air sebagai uji lanjutan. Dengan pembinaan mengenai penggunaan kemasan dan pemberian bantuan kemasan diharapkan dengan

bahan kemasan yang diberikan, pelaku usaha dapat mengemas produknya menjadi lebih menarik dan dapat dipasarkan ke jangkauan yang lebih luas.



Gambar 5. Poklaksar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara

b. Pelatihan Pembinaan Pengolahan dan Ekspor Untuk Produk Olahan Hasil Perikanan di Provinsi Bangka Belitung

Pelatihan dilaksanakan berdasarkan Surat Dinas-Permintaan Pembina Mutu dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 500.3/672/DKUKM/2025 tanggal 4 November 2025, sehingga dilaksankannya kegiatan tersebut pada tanggal 12-14 November 2025. Kegiatan dihadiri oleh para pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi para pelaku UMKM pengolahan hasil perikanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan memperoleh pemahaman mengenai aspek mutu bahan baku, teknik penanganan ikan, serta penerapan teknologi pengolahan yang sesuai standar keamanan pangan. Dengan pemahaman tersebut, pelaku UMKM dapat memproduksi olahan perikanan yang lebih higienis, berkualitas, dan memiliki daya saing. Pelaksanaan pelatihan pembinaan pengolahan produk perikanan bagi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berjalan dengan baik dan lancar. Seluruh materi telah disampaikan secara komprehensif dan diikuti dengan antusias oleh para peserta. Pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kapasitas peserta dalam pengolahan hasil perikanan yang higienis, berkualitas, dan memenuhi standar. Kegiatan ini

diharapkan memberikan dampak positif terhadap pengembangan usaha serta peningkatan kualitas produk perikanan di wilayah Bangka Belitung.



Gambar 6. Pelatihan pembinaan pengolahan dan ekspor untuk produk olahan hasil perikanan di Provinsi Bangka Belitung

c. Workshop Peningkatan Kapasitas Pemindang Ikan Mitra Operator Holding UMKM Sektor Perikanan di Kab. Tegal

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT Satya Trinadi Komira Perkasa selaku Operator Holding UMKM sektor perikanan, PT Hidayah Bahari Sejahtera sebagai mitra industri, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, pelaku usaha pemindang Kabupaten Tegal serta didukung oleh ASKRINDO dan instansi terkait lainnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pendampingan pembinaan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil dan melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas produksi. Kegiatan workshop ini memberikan manfaat yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman pemindang ikan di Kabupaten Tegal mengenai pentingnya mutu, keamanan pangan, dan sertifikasi SKP. Diharapkan melalui tindak lanjut yang konsisten dan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta pelaku usaha, pemindang ikan di Kabupaten Tegal dapat meningkatkan daya saing produk dan memperluas akses pasar.



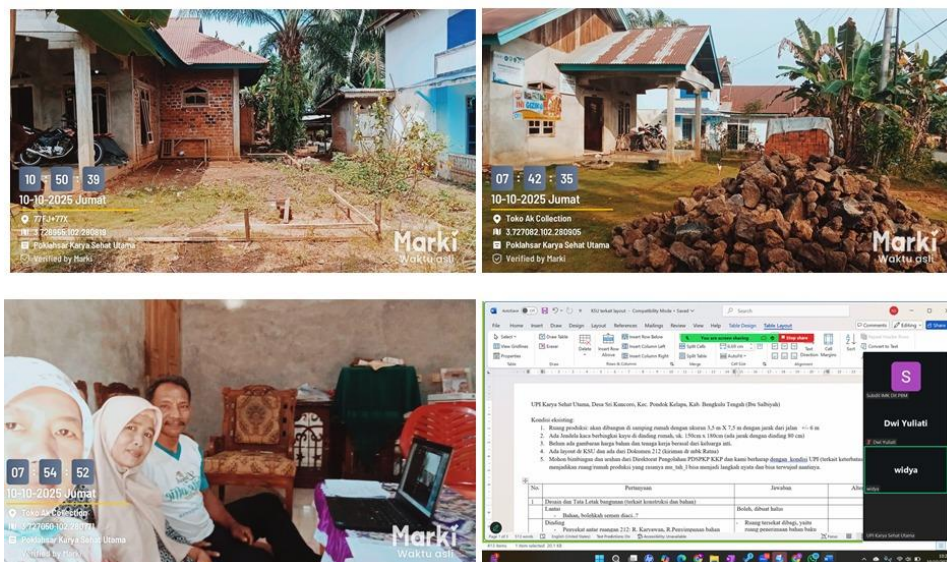
Gambar 7. Workshop Peningkatan Kapasitas Pemindang Ikan Mitra Operator Holding UMKM Sektor Perikanan di Kab. Tegal

2. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil

a. Poklajsar Karya Sehat Utama, Kab. Bengkulu Tengah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10,16, 23, dan 26 Oktober 2025 di Kab. Bengkulu Tengah. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Poklajsar Karya Sehat Utama, Penyuluh Perikanan Kab. Bengkulu Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu Tengah, BPOM Provinsi Bengkulu, Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan-Direktorat Pengolahan PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas produksi, alur produksi, tata letak ruang proses, dan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil, serta pendampingan legalitas untuk peningkatan menuju UKM naik kelas. Sedangkan kegiatan pelaksanaan Pembahasan Rencana Pembentukan Asosiasi Mikroalga bertujuan untuk pembahasan struktur pengurus Pengurus Asosiasi Mikroalga Indonesia (ASMI). Tim Pembinaan Pengolahan Hasil akan mengirimkan contoh desain yang sesuai dengan kondisi eksisting dan ketersediaan lokasi untuk diterapkan oleh UPI. Dit. Pengolahan akan melanjutkan pendampingan lanjutan kepada Poklajsar Karya Sehat Utama agar dapat meningkatkan mutu dan keamanan produk olahan ikan sekaligus memperkuat daya saing usaha di tingkat lokal dan nasional, serta mengundang BPOM untuk melakukan pendampingan mengenai tata letak fasilitas dan persyaratan izin edar. Penyuluh perikanan daerah akan memfasilitasi pendampingan lanjutan serta koordinasi dengan pemerintah daerah terkait

pelatihan/bimtek penanganan dan pengolahan ikan yang baik agar UPI memiliki sertifikat mutu. Diperlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan bahwa, desain layout telah disesuaikan dengan rekomendasi pembinaan; sistem aliran air limbah dan bahan bangunan memenuhi standar higiene, serta poklhasr dapat memenuhi persyaratan dasar untuk registrasi produk olahan ikan ke BPOM. Kegiatan kunjungan lapang di PT. Hidayat Bahari Sejahtera telah berjalan dengan baik. Perusahaan menunjukkan komitmen dalam pemenuhan standar MD, SNI dan peningkatan fasilitas bangunan sesuai standar keamanan pangan. Beberapa perbaikan masih diperlukan untuk mencapai standar keamanan pangan, namun progres renovasi dan pembinaan yang dilakukan sudah cukup baik dan berpotensi mempercepat proses pemenuhan legalitas usaha serta peningkatan mutu produk.

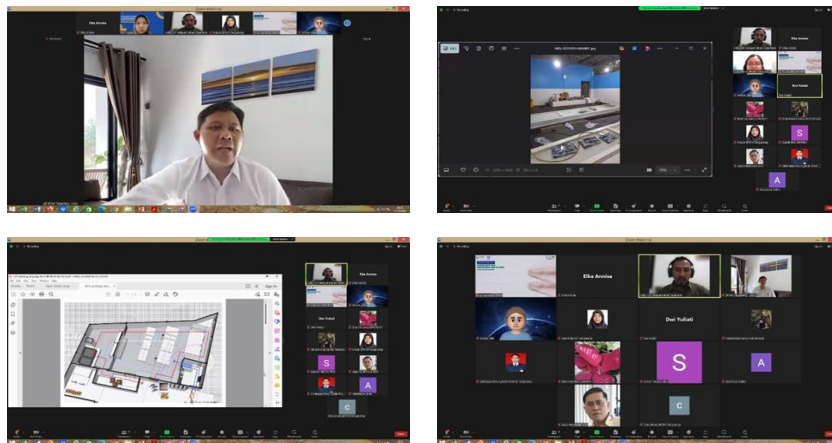


Gambar 8. Poklhasr Karya Sehat Utama, Kab. Bengkulu Tengah

b. PT. Hidayat Bahari Sejahtera, Kota Tangerang Selatan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15, 17 Oktober, dan 26 November 2025 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari PT. Hidayat Bahari Sejahtera (Aditya Firmansyah), Tim Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kabupaten Tangerang (Clara, Dwi, dan Imasni), Penyuluh Perikanan Kota Tangerang Selatan; serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tangerang Selatan, Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan PDSPKP. Tujuan pelaksanaan

kegiatan adalah melakukan pendampingan teknis terkait penerbitan legalitas izin edar (MD) melalui sistem BPOM, Membahas kesiapan fasilitas produksi, tata letak, dan dokumen pendukung sesuai standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) dalam rangka penerbitan legalitas izin edar (MD), Mengidentifikasi kendala dan kebutuhan teknis pelaku usaha dalam proses sertifikasi MD dan Halal. Proses pendampingan PT Hidayat Bahari Sejahtera berjalan dengan baik dan mendapat dukungan dari BPOM dan Dinas setempat. Perusahaan menunjukkan komitmen memenuhi standar CPPOB dan izin edar MD. Direktorat Pengolahan diharapkan terus mengawal proses pembinaan, termasuk fasilitasi sarana dan dukungan sertifikasi halal. Direktorat Pengolahan bersama BBP3KP akan terus mendampingi PT HBS hingga penerbitan sertifikat SNI dan MD. Perlu dilakukan pembahasan lanjutan di lapangan bersama BPOM dan Dinas terkait untuk finalisasi layout dan alur proses produksi. Percepatan pendampingan diharapkan selesai sebelum peringatan Harkanas (20 November 2025) agar PT HBS dapat menjadi role model UMKM Pindang ber-SNI.

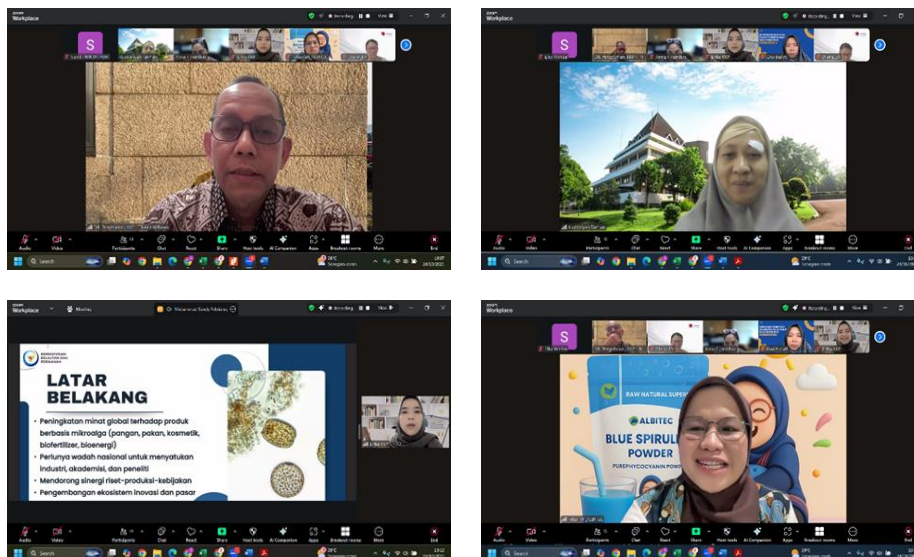


Gambar 9. PT. Hidayat Bahari Sejahtera, Kota Tangerang Selatan

c. Pembentukan Asosiasi Mikroalga Indonesia

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober dan 12 Desember 2025 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Dr. rer. nat. Kustiariyah, S.Pi, M.Si - IPB University, dan perwakilan dari PT. Alga Biotechnologi, Evergen Resources, PT. Alga Nusa Sejahtera, Ketua Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan, Direktorat Pengolahan, Ketua Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil, Direktorat Pengolahan, dan Anggota Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil, Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk

mengumpulkan pandangan dari beberapa pihak terkait arah dan juga tujuan pembentukan asosiasi mikroalga. Berdasarkan hasil rapat tersebut, makan diputuskan secara bersama bahwa pembentukan Asosiasi Mikroalga akan segera dilakukan dengan langkah awal yaitu pembentukan formatur lebih dahulu dengan perwakilan dari masing-masing sector yaitu KKP, IPB, BRIN, PT Albitech, Evergen Resources, dan PT Alga Nusa Sejahtera dan KKP akan berkoordinasi terlebih dahulu perihal syarat dan ketentuan secara hukum perihal pembentukan asosiasi. Akan dilakukan tindak lanjut dengan melaksanakan pertemuan lanjutan dengan semua anggota asosiasi sebelum tanggal 24 Desember 2025 untuk menyelesaikan struktur pengurus ASMI setelah draft kerangka organisasi yang terperinci disusun.

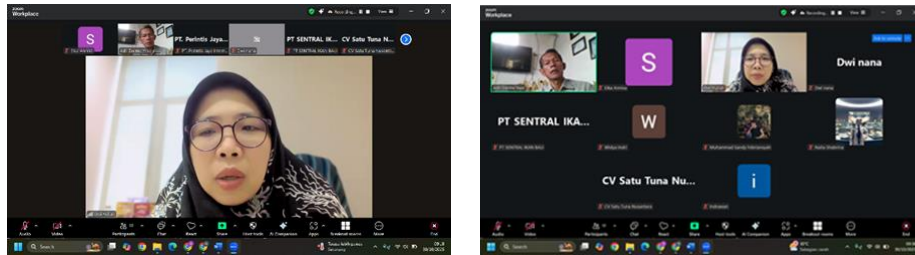


Gambar 10. Pembentukan Asosiasi Mikroalga Indonesia

d. Pendampingan Pembinaan UPI Mikro Kecil Forum Maritim Bali

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari PT. Iambeu Mina Utama, PT. Sentra Ikan Bali, CV. Yanidilla Adilindo, PT. Sentral Ikan Bali, CV. Sari Nusa Laut, PT. Bintang Samudera Bersinar, UD. Putra Mandiri, UD. Neptune Fish Market, UD. Mastra Jaya Abadi, PT. Sari Nusa Sejahtera, PT. Perintis Jaya International, CV. Satu Tuna Nusantara, PT. Perintis Jaya Internasional, CV. Sinar Timur Arafura, UKM Pelangi Seafood Bali, PT. Café Pandan Restaurant, CV. Dus International Trading, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Pengurus Forum Maritim Bali, Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai langkah awal untuk

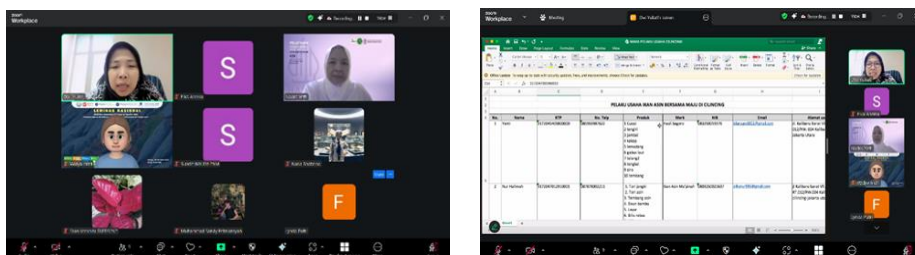
mengidentifikasi kebutuhan pendampingan pembinaan terhadap pelaku usaha yang tergabung pada Forum Maritim Bali. Forum Maritim Bali membutuhkan waktu seminggu untuk menyebarluaskan kuisioner kepada pelaku usaha yang tergabung dalam Forum Maritim Bali, Direktorat Pengolahan akan menganalisis kebutuhan pendampingan pembinaan yang dibutuhkan oleh Forum Maritim Bali setelah pelaku usaha mengisi kuisioner yang disebarakan



Gambar 11. Pendampingan Pembinaan UPI Mikro Kecil Forum Maritim Bali

e. Poklahsar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara

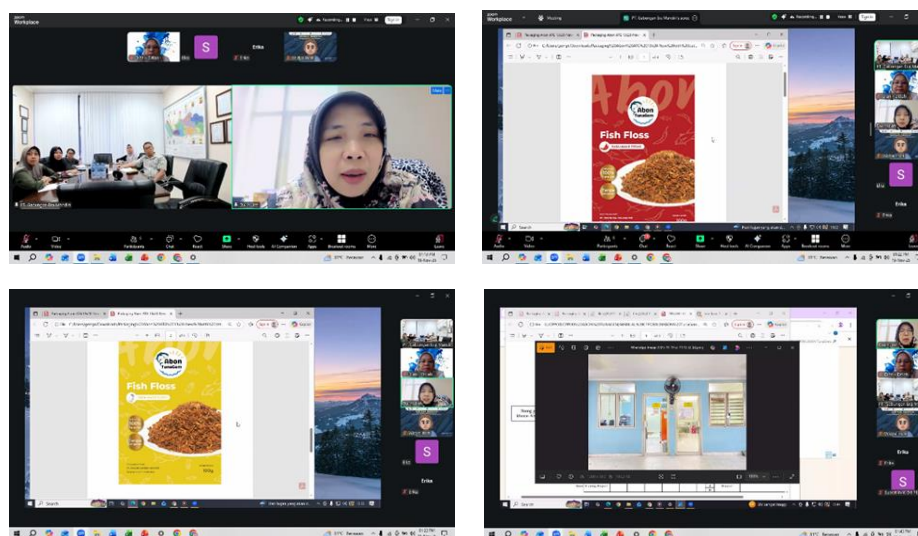
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari SMESCO, Poklahsar Bersama Maju, Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pendampingan menuju sertifikasi halal kepada pelaku usaha skala mikro dan kecil di Sentra Pengolah Ikan Asin, Cilincing. Dari hasil kegiatan pendampingan legalitas halal untuk Poklahsar Bersama Maju harus dilakukan tindak lanjut sebagai berikut, pelaku usaha akan menambahkan KBLI 10211 pada NIB, Dit. Pengolahan akan membantu kelengkapan dokumen sertifikasi halal, Dit. Pengolahan akan melakukan monitoring proses pengajuan halal serta pendampingan higienitas tempat produksi, SMESCO akan menjadwalkan kunjungan lapangan ke Sentra Pengolah Ikan Asin, Cilincing.



Gambar 12. Poklahsar Bersama Maju, Kota Jakarta Utara

f. PT. Gabungan Era Mandiri (GEM), Kota Jakarta Utara

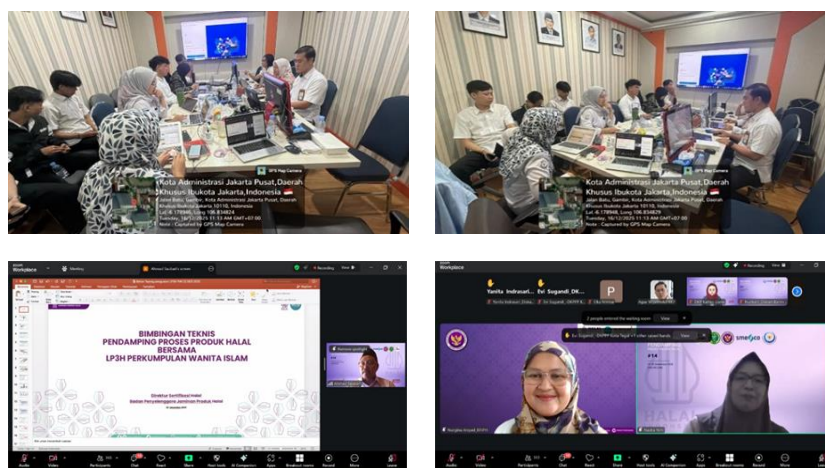
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Manager Produksi PT GEM (Bpk. Hari) didampingi Tim PT GEM dan Tim kerja Pembinaan Pengolahan Hasil Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melaksanakan pembinaan peningkatan kapasitas produksi, alur produksi, tata letak ruang proses, dan penerapan mutu program kelayakan dasar *Good Manufacturing Practices* (GMP) bagi UPI Skala Mikro dan Kecil, serta pendampingan legalitas untuk peningkatan menuju UKM naik kelas. Rapat ini membahas kegiatan pembinaan mutu dan keamanan produk pada PT Gabungan Era Mandiri yang diadakan secara online pada 13 November 2025. Ruang pengolahan abon ikan terletak di lantai 2 dengan ukuran 3 m x 5 m dan dilengkapi dengan berbagai peralatan seperti rak plastik, meja stainless, dan kompor gas. Bahan baku untuk abon ikan terdiri dari shreeded/flake segar dingin dan shreeded beku yang disimpan di cold storage. Selain itu, bahan lain seperti bawang goreng dan minyak goreng juga digunakan. PT GEM belum aktif memproduksi abon ikan, dengan kapasitas maksimal 5 kg ikan setiap hari, menghasilkan dua jenis produk, yaitu Abon Pedas Manis dan Abon Manis Gurih. Produk saat ini dipasarkan kepada karyawan, dengan rencana menjangkau pasar lokal di masa depan. Sertifikat produk telah diperbarui per 19 Agustus 2025.



Gambar 13. PT. Gabungan Era Mandiri (GEM), Kota Jakarta Utara

4. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Webinar atau Zoominar

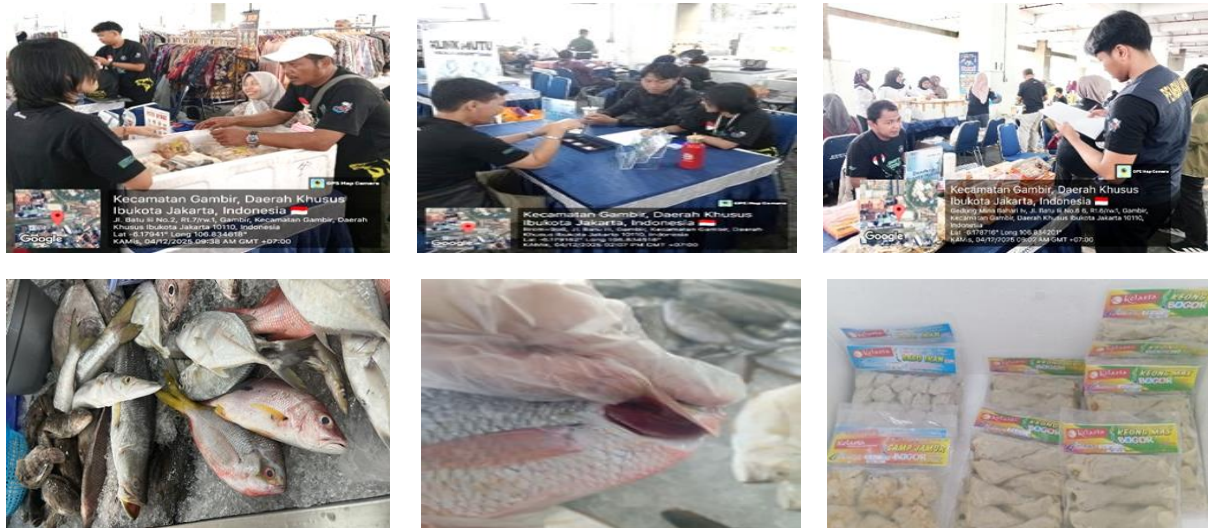
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 dan 22 Desember 2025 secara daring melalui aplikasi *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh peserta pelatihan sebanyak 549 orang yang berasal dari berbagai instansi pusat dan daerah serta pemangku kepentingan terkait. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang jaminan produk halal, khususnya bagi Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan terdaftar dan Analis Pasar Hasil Perikanan di Indonesia. Kegiatan dimulai dengan pembukaan oleh Ketua Umum PP Wanita Islam yang menekankan peran pendamping halal untuk mendukung UMKM dalam sertifikasi halal. Sambutan juga diberikan oleh Direktur Bisnis dan Pemasaran SMESCO Indonesia, serta Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan yang resmi membuka Pelatihan Pendamping Proses Produk Halal (P3H). Materi pelatihan mencakup kebijakan jaminan produk halal yang dijelaskan oleh Dra. Hj. Marfuah Musthafa, serta proses sertifikasi halal melalui skema self declare oleh Dra. Hj. Nadra Yetti. Peserta juga diajari penggunaan aplikasi Learning Management System (LMS) dan SIHALAL. Pelatihan dilanjutkan mandiri lewat LMS BPJPH hingga 20 Desember 2025. Pembahasan pada 22 Desember 2025 merupakan lanjutan dari pelatihan sebelumnya. Sesi pembukaan dimulai dengan menjelaskan regulasi terbaru mengenai sertifikasi halal dan kuota gratis untuk tahun 2026. Dengan menekankan pentingnya pendamping dalam membantu pelaku usaha.



Gambar 14. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Webinar atau Zoominar

5. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 1-2 Oktober 2025, 5-6 November 2025, dan 4-5 Desember 2025 secara luring di Gedung Mina Bahari III. Kegiatan diikuti oleh Unit Pengolah Ikan (UPI) yang berpartisipasi dalam kegiatan Bazar KKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan pemantauan mutu hasil perikanan dan pembinaan terhadap UMKM yang mengikuti bazar, sekaligus menjadi wadah konsultasi untuk memberikan solusi bagi UMKM yang memiliki permasalahan terkait dengan jaminan mutu dan keamanan pangan yang dihasilkan serta sertifikasi produk. Klinik Mutu hadir untuk memantau kualitas hasil perikanan dan membimbing UMKM dalam bazar, serta memberikan konsultasi untuk masalah terkait jaminan mutu dan keamanan produk. UMKM yang berkonsultasi akan didata untuk pemantauan lebih lanjut. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa banyak UMKM belum memahami SKP, bahan tambahan pangan, dan teknik pengolahan yang tepat. Beberapa UMKM juga tidak memiliki izin edar dan sertifikasi yang diperlukan. Selain itu, mayoritas UMKM belum menerapkan SNI dan beberapa produk tidak mencantumkan tanggal produksi dan kedaluwarsa pada label. Pada bulan November, Hari Ikan Nasional diperingati dengan kegiatan bazar produk perikanan. Klinik Mutu terlibat dalam memberikan layanan pembinaan dan edukasi kepada tenant bazar terkait peningkatan mutu dan keamanan produk. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa beberapa tenant belum memiliki kelengkapan legalitas usaha, yang membatasi akses pasar mereka. Pelaku usaha menghadapi kendala dalam SKP karena kurangnya pembina mutu dan kesulitan mengakses sistem online. Beberapa tenant juga belum menerapkan SNI dan menggunakan kemasan yang tidak memenuhi standar. Meskipun tenant menjaga kesegaran produk dengan baik, mereka sering tidak menyediakan es pada ikan yang dipajang, menyebabkan penurunan mutu. Penanganan ikan pasca panen teridentifikasi perlu perbaikan, terutama di aspek kebersihan. Selama bulan Desember, Klinik Mutu melakukan pemantauan terhadap higienitas dan rantai dingin, serta memberikan edukasi mengenai GMP dan sanitasi. Hasil pemantauan menunjukkan kondisi yang sama dengan sebelumnya, di mana tenant bazar masih kekurangan kelengkapan legalitas usaha. Penanganan ikan dan penggunaan kemasan yang sesuai juga masih perlu diperbaiki, serta ada masalah penanganan ikan yang dapat mengakibatkan kontaminasi.



Gambar 15. Pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) Skala Mikro dan Kecil Melalui Klinik Mutu

B. Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Skala Menengah dan Besar

Pembinaan Unit Penanganan dan Pengolahan Skala Menengah dan Besar adalah jumlah unit penanganan dan unit pengolahan hasil kelautan dan perikanan skala menengah dan besar yang telah dibina dalam satu periode waktu. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 128 Industri dengan target 128 Industri. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan UPI Penanganan dan Pengolahan Skala Menengah dan Besar, yaitu:

1. Diskusi Pemanfaatan Hasil Samping UPI Menengah dan Besar (UPI MB) untuk Meminimalisir Food Loss and Waste serta Mendukung Ekonomi Sirkular Sektor Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 dan 9 Oktober 2025. Kegiatan dilaksanakan dalam 2 (dua) sesi yaitu pada tanggal 8 Oktober dengan mengundang UPI yang berlokasi di DKI Jakarta dan pada tanggal 9 Oktober dengan peserta UPI yang berlokasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Timja Pemetaan dan Analisis Pengolahan, Timja Diversifikasi dan Inovasi Produk Non Pangan, Pembinaan Pengolahan Hasil, Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan identifikasi dan pemetaan awal hasil samping dari UPI, sebagai upaya penerapan Ekonomi Sirkular khususnya dalam meminimalisir *Food Loss and Waste* (FLW) di sektor perikanan. Identifikasi awal pada kegiatan diskusi pemanfaatan hasil samping ini fokus pada komoditas kakap, tilapia, dan patin. Diskusi dengan UPI menunjukkan bahwa hasil samping umumnya dijual ke pengepul atau diproses sendiri atau dijual ke UKM binaan untuk

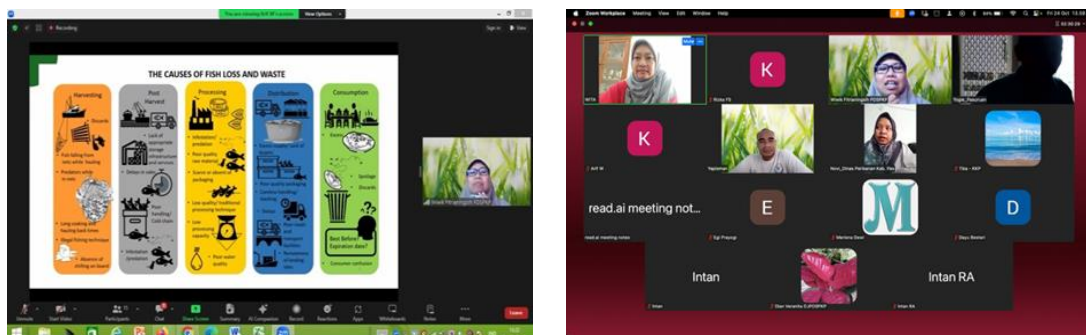
diproses lebih lanjut menjadi produk bernilai tambah. UPI sangat mendukung program pemanfaatan hasil samping. Optimalisasi rantai pasok melalui pengepul besar atau aggregator diperlukan agar hasil samping dapat memberikan manfaat yang baik seperti meningkatkan pendapatan, dan mendukung ekonomi sirkular. Tindak lanjut yang dapat dilakukan meliputi kunjungan lapangan, pemetaan komoditas lain, dan penyusunan model pemanfaatan hasil samping UPI.



Gambar 16. Diskusi Pemanfaatan Hasil Samping UPI Menengah dan Besar (UPI MB)

2. Rapat Tindaklanjuti Penyusunan Modelling Ekonomi Sirkular Pemanfaatan Hasil Samping UPI

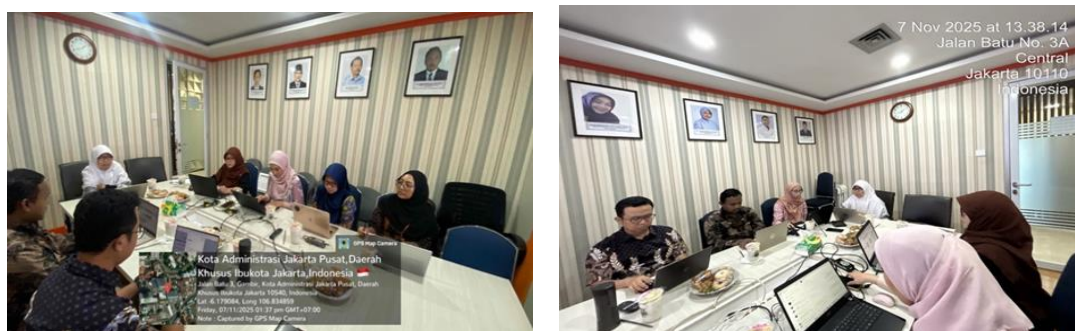
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dibuka oleh Ketua Timja Pemetaan dan Analisis Pengolahan serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pasuruan dan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menggali informasi mengenai pemanfaatan hasil samping industri perikanan, khususnya yang dilakukan oleh para pengepul. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Webinar Ekonomi Sirkular, dengan fokus pada upaya memaksimalkan pemanfaatan produk perikanan dan mengurangi limbah hasil olahan. Rapat menekankan pentingnya ekonomi sirkular dalam mengurangi *food loss and waste* (FLW) dan meningkatkan nilai ekonomi produk perikanan. Di Kabupaten Pasuruan, pemanfaatan hasil samping seperti kulit ikan dan kerang perlu didata lebih lengkap, termasuk peran pengepul dan pengolah. Optimalisasi rantai pasok dan pemetaan proses bisnis pengepul diperlukan untuk mendukung ekonomi sirkular, menjaga mutu produk samping, dan menyusun model bisnis berbasis data yang akurat.



Gambar 17. Rapat Tindaklanjuti Penyusunan Modelling Ekonomi Sirkular Pemanfaatan Hasil Samping UPI

3. Koordinasi Pemutakhiran Dashboard Data Direktorat Pengolahan

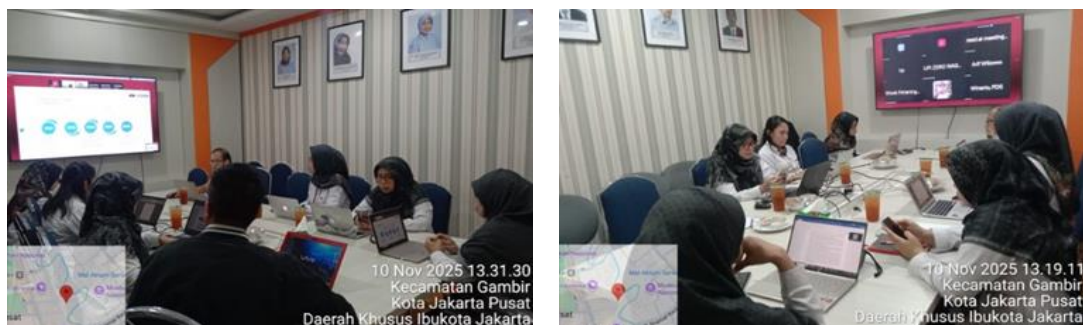
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 di R.R. SKP Dit. Pengolahan. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan dihadiri anggota Tim Data dari Direktorat Pengolahan dan Setdit PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai tindaklanjuti atas rencana pemutakhiran data pada laman dashboard yang sudah dibangun sejak tahun 2024. Dashboard Direktorat Pengolahan saat ini didominasi data statis yang diperbarui tahunan, sedangkan data dinamis seperti capaian output, sebaran UPI, VPO, dan sosialisasi diversifikasi diperbarui setiap triwulan atau semester. Pemutakhiran data disesuaikan dengan frekuensi: triwulan (sebaran UPI, sosialisasi), semester (VPO), dan tahunan (bantuan pemerintah, PM mutu, SNI, laboratorium, data produk olahan, profil sentra dan utilitas UPI MB, penerima DAK 2024). Angka VPO UPI MK 2024 masih berupa prognosa dan perlu diperbarui menjadi capaian final, sementara data utilitas menggunakan kapasitas 2023 sehingga perlu disesuaikan. Untuk keamanan, disarankan pembuatan laman dashboard dengan akses login terbatas.



Gambar 18. Koordinasi Pemutakhiran Dashboard Data Direktorat Pengolahan

4. Koordinasi Penguatan Operasional dan Strategi Pemasaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) Zero Waste Kabupaten Tulungagung

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 10 November 2025 di R.R. SKP Dit. Pengolahan. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan Dinas KP Kab Tulungagung dan Pengelola UPI Zero Waste, Sesditjen PDSPKP, Direktorat Pemasaran, Direktorat Pemberdayaan Usaha dan Timja Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah. Membahas perkembangan pengelolaan UPI Zero Waste, kendala yang dihadapi, dan arah sinergi ke depan dalam pengelolaan UPI Zero Waste Tulungagung, yang dibangun sejak tahun 2020 oleh Ditjen PDSPKP. UPI Zero Waste Tulungagung telah berkembang sejak serah terima aset pada 2021, dengan tujuan memberikan nilai tambah dari hasil samping patin. Produksi meningkat signifikan hingga 2023, kemudian menurun pada 2024–2025 akibat pasokan bahan baku terbatas, meskipun begitu inovasi produk seperti bakso kerikil dan bakso tuna tetap diminati pasar lokal. UPI juga berperan sebagai sarana edukasi Gemarikan dan menjadi pemasok bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala utama meliputi jangkauan pasar yang terbatas, rendahnya minat masyarakat terhadap olahan ikan, saluran limbah yang tersumbat, dan kerusakan peralatan produksi. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya peningkatan akses pasar, promosi produk, sertifikasi, penguatan mutu dan kemasan, serta kurasi UMKM Naik Kelas. Selain itu, kontinuitas pasokan bahan baku harus dijaga melalui kemitraan dengan UPI fillet patin lain. Tindak lanjut yang disarankan : meningkatkan sinergi antara Dinas Perikanan, KKP, dan pelaku usaha; menjamin kontinuitas bahan baku; mengembangkan inovasi produk dan kemasan; serta memperluas pasar domestik melalui promosi dan pameran perikanan.



Gambar 19. Koordinasi Penguatan Operasional dan Strategi Pemasaran Unit Pengolahan Ikan (UPI) Zero Waste

C. Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil

Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil dilakukan melalui sosialisasi, bimtek, dan atau pembinaan lapangan yang dibuktikan dengan rekomendasi dan/atau manual *Hazard Analysis Critical Control Points* (HACCP) dan/atau laporan pembinaan. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 165 Industri dengan target sebesar 165 Industri. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan bagi Unit Penanganan dan Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan Skala Mikro dan Kecil, yaitu:

1. Pembinaan Calon Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Alami Indah Bersinar

Rapat dipimpin oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri oleh perwakilan PT. Alami Indah Bersinar serta Timja Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Tujuannya adalah untuk membina calon UPI PMA (Korea) mengenai perizinan, layout produksi, serta mekanisme Sertifikasi SKP dan HACCP. Rapat dilakukan pada 10 dan 13 Oktober 2025. Produk yang akan diolah adalah Cumi Kering untuk ekspor ke Korea. UPI perlu memastikan ketersediaan personil bersertifikat HACCP dan mengecek izin lingkungan. Disarankan untuk menggunakan air sumur standar untuk produksi. Pembinaan akan dilanjutkan setelah perbaikan dilakukan. UPI harus memenuhi persyaratan perizinan dasar dan izin ekspor.



Gambar 20. Pembinaan Calon Unit Pengolahan Ikan (UPI) PT. Alami Indah Bersinar

2. Rapat Pembahasan Update Tindak Lanjut Temuan FDA terkait Radiokatif Cesium-137

Rapat dipimpin oleh Sekretaris Ditjen PDSPKP pada 9 Oktober 2025, dihadiri oleh beberapa lingkup Ditjen. PDSPKP dan lingkup Dit. Pengolahan. Tujuan rapat adalah membahas tindak lanjut temuan FDA tentang radioaktif Cesium-137. Rapat menyoroti keluhan pasar yang tidak dapat menyerap udang karena isu kontaminasi, dan menghentikan sementara pengiriman udang dari Lampung dan Jawa ke Amerika Serikat. Diperlukan pernyataan pemerintah untuk meyakinkan masyarakat dan eksportir tentang kondisi udang Indonesia, sementara SCI mulai memasok ke MBG dan berkoordinasi dengan BGN. Langkah mitigasi juga diperlukan untuk penyerapan udang di pasar domestik.

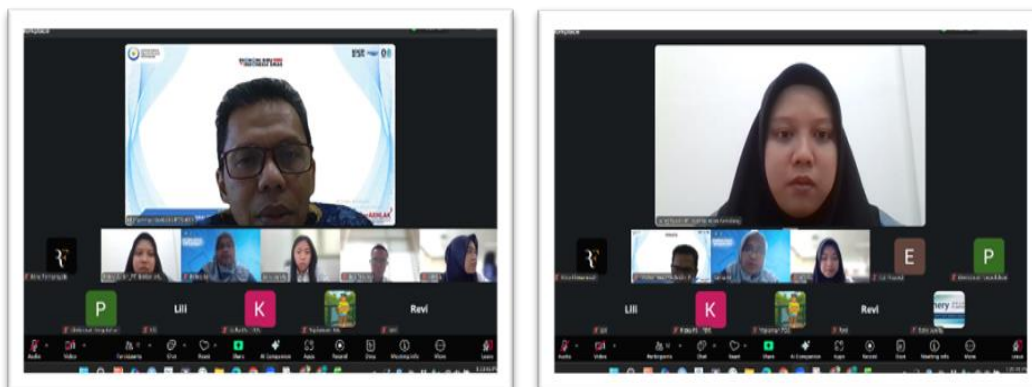


Gambar 21. Rapat Pembahasan Update Tindak Lanjut Temuan FDA terkait Radiokatif Cesium-137

3. Pembinaan PT. Bintang Intan Gemilang Kabupaten Bintan

Rapat dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 secara daring. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, dihadiri oleh perwakilan PT. Bintang Intan Gemilang dan Tim Kerja Direktorat Pengolahan. Tujuan rapat adalah mereview dokumen manual HACCP untuk berbagai jenis ikan. Tim reviewer memberikan catatan terhadap 4 dokumen dan PT. BIG menyetujui usulan perubahan. Perbaikan meliputi alur proses produksi, analisa bahaya, dan prosedur pengecekan bahan baku. Tim HACCP akan menyusun kriteria bahaya dan tingkat

keparahan. PT. BIG akan memperbaiki dokumen HACCP sesuai masukan dan melanjutkan pembinaan hingga mendapatkan sertifikat HACCP.



Gambar 22. Pembinaan PT. Bintan Intan Gemilang Kabupaten Bintan

4. Pembahasan Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical and Control Point* (PMMT/HACCP)

Rapat penyelenggaraan pembahasan juknis Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical and Control Point* (PMMT/HACCP) dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober, 23 Oktober, 30 Oktober, 4 November, 14 November, 20 November, 27 November, dan 5 Desember 2025. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menyusun petunjuk teknis pembinaan dalam rangka penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) Pembahasan Latar belakang dari rapat ini adalah sebagai berikut: PP nomor 28 tahun 2025 menetapkan Laporan Hasil Pembinaan (LHP) sebagai salah satu syarat dalam penerbitan SKP dan Sertifikat PMMT/HACCP Prosedur penerbitan LHP telah dituangkan dalam Rancangan PermenKP turunan dari PP 28 tahun 2025 yang akan merevisi PermenKP 10 Tahun 2021 Dalam Rancangan PermenKP tersebut, belum mengatur teknis penerbitan LHP secara detail mengenai lama waktu penerbitan LHP, ceklist pembinaan yang digunakan, format LHP, dan format dokumen lainnya yang diperlukan dalam penerbitan LHP Dengan kondisi pada poin 4, diperlukan dokumen Petunjuk Teknis Pembinaan dalam rangka penerbitan SKP dan Sertifikat PMMT/HACCP. Substansi pada rancangan PermenKP yang perlu pendetailan adalah : Mekanisme pengambil alihan (takeover) pembinaan oleh provinsi atau pusat dalam kondisi sesuai pada pasal 163 Mekanisme pelaksanaan masing-masing jenis pembinaan (sosialisasi, bimtek, dll)

dan output dari masing-masing. Berisi: - Keputusan apakah sudah dapat direkomendasikan - Saran perbaikan yang harus dilakukan UPI - Tindakan selanjutnya yang perlu dilakukan Pembina Mutu setelah tindak lanjut UPI (apakah perlu mengulang verifikasi lapangan, atau cukup evaluasi dokumen perbaikan) Format laporan hasil pembinaan dari dirjen/kepala dinas kepada UPI, tembusan dirjen PDSPKP, Kabadan, dinas Mekanisme audit pelaksanaan pembinaan di provinsi dan kab/kota. Direktur Pengolahan memberikan masukan diantaranya : Kriteria penilaian harus disusun selaras dengan instrumen pembinaan (checklist) yang digunakan di lapangan, sehingga terdapat keseragaman antara proses pembinaan dan penilaian. Tembusan pertama pada dokumen Juknis harus ditujukan kepada Direktur Jenderal PDSPKP selaku pihak yang menetapkan dan bertanggung jawab atas penyusunan Juknis. Apabila terdapat perpanjangan SKP, manajer puncak sebaiknya tidak terlibat langsung dalam proses perpanjangan tersebut, untuk menjaga objektivitas dan tata kelola yang baik. Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Perikanan memberikan masukan diantaranya : Untuk mempercepat penyusunan Juknis Pembinaan, perlu disampaikan bahwa PP Nomor 8 telah diterbitkan sebagai dasar bagi revisi Permen KP Nomor 10. Tim juga telah melakukan pertemuan dengan BPPMHKP, meskipun belum semua substansi dapat dimasukkan dalam pembahasan tersebut. Permen KP Nomor 10 yang berlaku saat ini memang perlu memberikan kemudahan dalam pelaksanaan, namun tanpa mengurangi prinsip-prinsip dasar mutu yang sudah ditetapkan. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa LHP dapat diterbitkan meskipun ada kekurangan teknis pada KBLI, dengan tetap menjamin aspek legalitas dan mutu pelaksanaan di lapangan. Untuk memperlancar proses, perlu ada pertemuan dengan Biro Hukum guna membahas izin prakarsa, sehingga apabila disetujui, proses penetapan dapat segera dilanjutkan. Perluasan jenis produk maupun pembuatan unit baru akan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab bidang pembinaan, sehingga pembinaan memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan unit pengolahan yang berkelanjutan. Tim Kerja Hukum PDS memberikan usulan diantaranya : Substansi SPDI untuk ikan hias menjadi salah satu fokus pembahasan karena substansi lainnya telah selesai dibahas. Proses revisi Permen KP Nomor 10 saat ini masih menunggu jadwal harmonisasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Sebagai tambahan, mengingat saat ini masih terdapat pejabat dengan status Pelaksana Tugas (Plt), maka apabila

penyusunan Juknis dilakukan dalam masa ini, dokumen perlu dinaikkan ke Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) atau ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal. Regulasi tahun ini yang terkait dengan Juknis BP juga menunjukkan bahwa karena belum ada Dirjen definitif, maka penetapan dilakukan di tingkat Menteri, dengan Sekretaris Jenderal sebagai pihak yang memberikan justifikasi. Pembahasan regulasi ini tidak hanya melibatkan Biro Hukum PDSPKP, tetapi juga harus dikoordinasikan dengan Biro Hukum KKP, agar harmonisasi kebijakan dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Pada pasal pembinaan apabila suatu hal dapat dikenali secara jelas, maka perlu dilakukan justifikasi ke Biro Hukum untuk mendapatkan dasar dan kejelasan regulasinya. Dalam kondisi demikian, seharusnya terdapat sanksi atau punishment yang proporsional, yang nantinya perlu didiskusikan bersama Biro Hukum, dengan catatan tidak mengganggu proses pembinaan yang sedang berjalan. Ketentuan tambahan juga perlu dimasukkan dalam persyaratan pembuatan dokumen atau izin, agar terdapat kepastian dan keseragaman prosedur. Salah satu isu penting yang perlu disampaikan kepada Biro Hukum adalah mengenai ketersediaan SDM di daerah. Kesimpulan Rapat pembahasan juknis dilakukan untuk menyusun petunjuk teknis pembinaan dalam rangkai penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dan Sertifikat

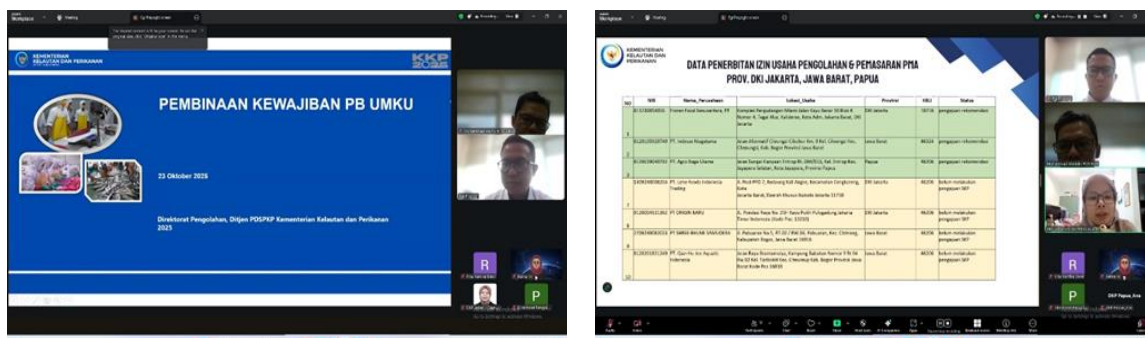


Gambar 23. Pembahasan Petunjuk Teknis Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan (SKP) dan Program Manajemen Mutu Terpadu/*Hazard Analysis Critical and Control Point* (PMMT/HACCP)

5. Pembinaan Pemenuhan Kewajiban Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) Bagi UPI Penanaman Modal Asing (PMA)

Kegiatan dilaksanakan pada 23 dan 29 Oktober 2025. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk, dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Pengolahan dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan rapat adalah untuk menindaklanjuti koordinasi tentang 44 UPI PMA yang pengurusan izin tetapi

belum memiliki SKP. Dari 44 UPI, 14 di antaranya belum memiliki SKP dan 4 sudah mengajukan permohonan. PermenKP 10 Tahun 2021 mengharuskan UPI Menengah Besar memiliki SKP dalam waktu 3 bulan setelah izin usaha. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua mengakui tidak mengikuti perkembangan SKP karena kekosongan personel. Rapat ini menghasilkan rencana tindak lanjut untuk mendorong pengajuan SKP dan pembinaan lebih lanjut bagi UPI yang sudah mengajukan.

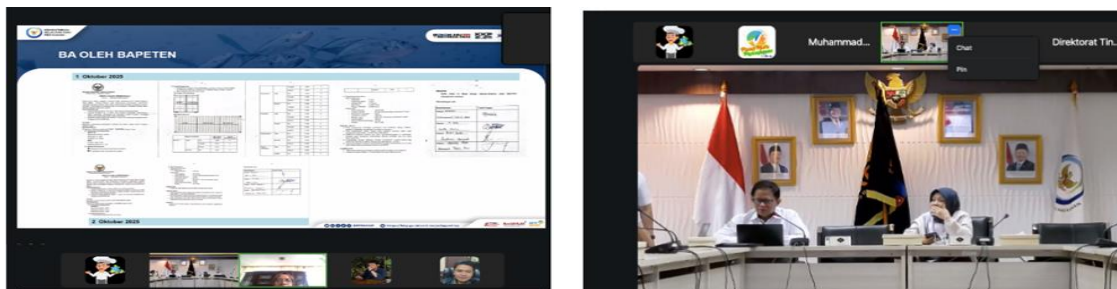


Gambar 24. Pembinaan Pemenuhan PB UMKU Bagi UPI PMA

6. Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemindaian Udag Terindikasi Cesium 137 dan Rencana Pelimbahan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 6 November 2025 secara daring. Kegiatan dipimpin oleh Kepala Pusat Pasca Panen, BPPMHKP, dihadiri oleh Kepala Pusat Manajemen Mutu, perwakilan dari BRIN, Bapeten, Kemenko Pangan, Barantin, Kementerian Lingkungan Hidup, Ditjen PDSPKP dan PT. BMS Cikande. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menindaklanjuti arahan Satgas Cesium 137 agar dapat segera melakukan tindak lanjut penanganan produk udang beku PT. BMS Cikande yang terindikasi cesium 137 dan rencana pelimbahan. Pemindaian untuk kontainer pertama dilakukan dari 1-10 Oktober, dan untuk kontainer kedua dan ketiga dari 10-17 Oktober 2025. Dua kontainer belum dipindai. Dari kontainer asal Los Angeles, ditemukan 262 MC terindikasi Cs-137, dan dari kontainer asal Miami, ditemukan 232 MC. Pemeriksaan kontainer dari Houston akan segera dilakukan. Produk yang tidak terpapar radioaktif sebanyak 1.538 MC dari kontainer pertama dan 1.226 MC dari kontainer kedua. 494 MC yang terdeteksi radioaktif dipisahkan untuk mencegah kontaminasi silang. PT. BMS Cikande merelakan produknya untuk dimusnahkan dan meminta untuk mempelajari pola penyebaran Cs-137. Bapeten mengkategorikan 494 MC sebagai limbah B3 non radioaktif. Menteri Lingkungan Hidup mengarahkan untuk segera melakukan pemusnahan

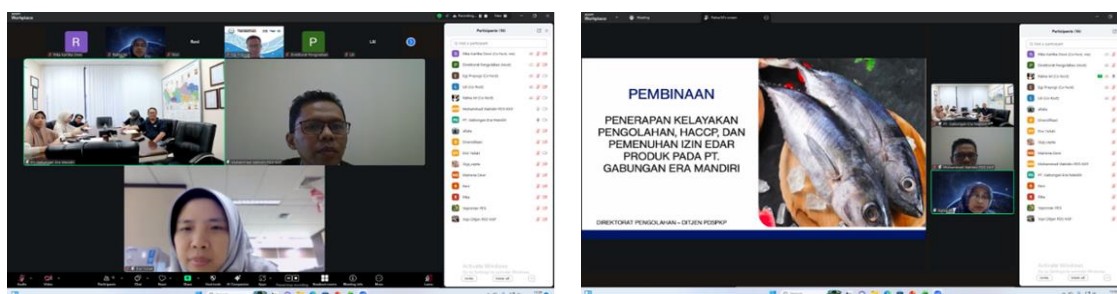
limbah terindikasi Cs-137. BRIN telah menyiapkan SOP pemusnahan, dan semua pihak diharapkan berkoordinasi untuk proses pemindahan MC ke lokasi pemusnahan.



Gambar 25. Rapat Tindak Lanjut Hasil Pemindaian Udang Terindikasi Cesium 137 dan Rencana Pelimbahan

7. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan, HACCP dan Izin Edar MD PT. GEM

Rapat dipimpin oleh ketua tim pembinaan mutu dan keamanan produk dan dihadiri oleh Tim PT. GEM serta perwakilan Dit. Pengolahan. Kegiatan ini adalah tindak lanjut kunjungan ke PT. GEM yang menambah ruang lingkup produk dengan abon ikan tanpa izin edar MD. Rapat diadakan secara daring pada 13 November untuk membahas produk olahan dan pengembangan produk. PT. GEM ingin mempercepat penerbitan izin edar MD dan telah memiliki sertifikat kelayakan serta sertifikasi halal. Ada 6 dokumen yang diperlukan untuk penerbitan IP CPPOB dan saat ini PT. GEM sudah menyiapkan 2 dokumen. Pembinaan akan dilakukan untuk layout ruang produksi dan akan dikoordinasikan dengan BPOM.



Gambar 26. Pembinaan Penerapan Kelayakan Pengolahan

8. Pembahasan Pengembangan Kompetensi Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Tahun 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Gedung Mina Bahari III Lantai 12a. Kegiatan dipimpin oleh Ketua

Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk Direktorat Pengolahan dan dihadiri oleh Perwakilan Tim Kerja Direktorat Pengolahan, Kasubbag Tata Usaha dan Pembina Mutu Lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan pembahasan konsep pelatihan (klasikal/Nonklasikal), kurikulum setiap skema pelatihan yang diusulkan, ketersediaan modul, bahan ajar soal pretes/posttes, kriteria dan kompetensi pelatih dan Usulan Tim. Rapat menyepakati pelaksanaan pengembangan kompetensi ASN melalui skema *Corporate University* KKP sebagai langkah strategis peningkatan kualitas SDM sektor kelautan dan perikanan. Ditjen PDS mengusulkan empat skema pelatihan utama Tahun 2026, yaitu Penerapan Kelayakan Pengolahan, Penerapan Sistem HACCP, Audit Internal Penerapan Sistem HACCP, serta Diversifikasi dan Inovasi Produk Kelautan dan Perikanan, yang telah dilengkapi kurikulum, alokasi jam pelatihan, serta kriteria peserta dan pelatih. Pelaksanaan diklat akan melibatkan Pembina Mutu Direktorat Pengolahan, dan pelatih yang terlibat akan diusulkan mengikuti pelatihan metodologi **e-milea** sebagai upaya penjaminan mutu pembelajaran.



Gambar 27. Pembahasan Pengembangan Kompetensi Pembina Mutu dan Asisten Pembina Mutu Tahun 2026

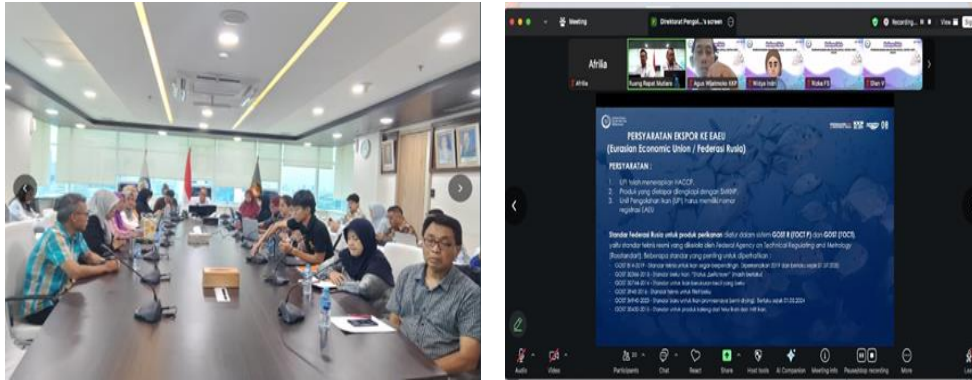
9. Bimtek Penerapan Kelayakan Pengolahan Bagi pelaku Usaha

Kegiatan dilaksanakan pada 4 Desember 2025 secara daring. Bimbingan teknis dibuka oleh Direktur Pengolahan dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Pemberdayaan Usaha. Kegiatan dihadiri oleh peserta yang merupakan pelaku usaha berjumlah 60 orang. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan

pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan pelaku usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip kelayakan pengolahan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui kegiatan ini, pelaku usaha diharapkan mampu memenuhi persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, meningkatkan kepatuhan terhadap standar sanitasi dan higiene, serta menjamin mutu dan keamanan produk yang dihasilkan agar berdaya saing di pasar nasional maupun internasional. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai penerapan kelayakan pengolahan, prosedur permohonan serta perpanjangan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), serta penyusunan panduan mutu GMP dan SSOP. Antusiasme peserta terlihat dari diskusi yang berkembang terkait kendala teknis di lapangan, khususnya pada UPI skala mikro dan kecil. Sebagai tindak lanjut, beberapa UPI terpilih akan diikutsertakan dalam Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP guna meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan secara berkelanjutan.

10. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2025 secara luring di Ruang Rapat Mutiara, Gedung Mina Bahari III Lantai 14 DKI Jakarta. Kegiatan Bimtek Penerapan Sistem HACCP bagi Pelaku Usaha dibuka oleh Plt. Dirjen PDSPKP (via online) dan dihadiri oleh Direktur Pengolahan, Direktur Pemberdayaan Usaha (via online), National Chief Technical Advisor GQSP yang diwakilkan oleh ibu drh. Novia Priyana, Narasumber dari Pusat Mutu Pasca Panen - BPPMHKP, Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, dan 20 peserta pelaku usaha pengolahan perikanan wilayah jabodetabek. Tujuan pelaksanaan adalah untuk meningkatkan Pengetahuan, keterampilan dan sikap pelaku usaha dalam penerapan Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Pelaku usaha memahami penyusunan Manual HACCP, Pelaku usaha memahami proses pengajuan Sertifikasi HACCP. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP bagi 20 pelaku usaha pengolahan hasil kelautan dan perikanan wilayah Jabodetabek telah berjalan dengan baik dan sesuai agenda. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman peserta mengenai penerapan HACCP, penyusunan Manual HACCP, serta proses Sertifikasi HACCP. Sebagai tindak lanjut, peserta akan menyusun Profil UPI dan Manual HACCP dengan pendampingan Pembina Mutu untuk mendukung percepatan penerbitan Sertifikat HACCP.



Gambar 28. Bimbingan Teknis Penerapan Sistem HACCP Bagi Pelaku Usaha

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi pada triwulan sebelumnya, telah dilaksanakan kegiatan bimtek penerapan sistem HACCP dan implementasi audit internal kepada 20 pelaku usaha UMKM yang dipersiapkan menuju sertifikasi HACCP. Kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan pendampingan oleh Pembina Mutu guna meningkatkan jam terbang serta memperkuat pemahaman terkait penerapan system HACCP dan audit internal HACCP. Adapun implementasi audit internal oleh Pembina mutu dalam penerapan HACCP pada UMKM yang dibina direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan I Tahun 2026.

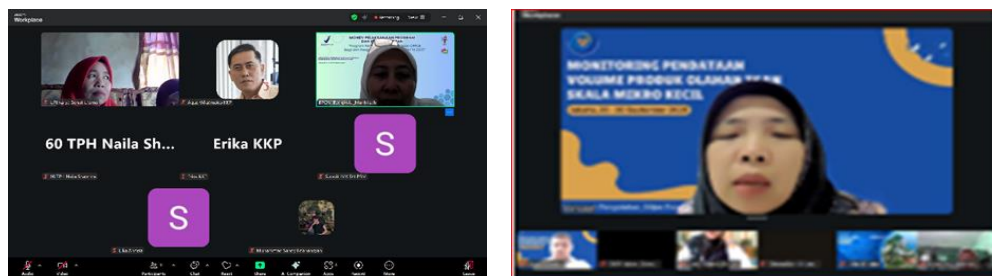
D. Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan adalah jumlah data dan informasi industri pengolahan hasil perikanan berupa data *losses* dan utilitas yang dihasilkan oleh Direktorat Pengolahan dalam satu periode waktu. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 2 dokumen dengan target sebesar 2 dokumen, yaitu data VPO dan Utilitas. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan, yaitu:

1. Profilling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 November 2025 secara luring dan daring di Ruang Rapat Pembinaan Hasil Kelautan dan Perikanan, Lantai 12, Gedung Mina Bahari III. Kegiatan dihadiri oleh Ketua Tim Kerja PPH, Agus Andi Subakir, S.Pi., M.P., Mariena Dewi, S.Pi., M.P., Tanto Dhaneswara, S.Pi., Sukma Ayu Permanasari, S.S.T.Pi., dan Mohamad Hapiz, S.E.. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan dokumen resmi yang berfungsi sebagai sumber data, analisis, dan visualisasi mengenai kondisi terkini pelaku usaha pengolahan hasil perikanan skala mikro dan kecil. Kegiatan rapat profiling membahas penyusunan buku Profilling UPI

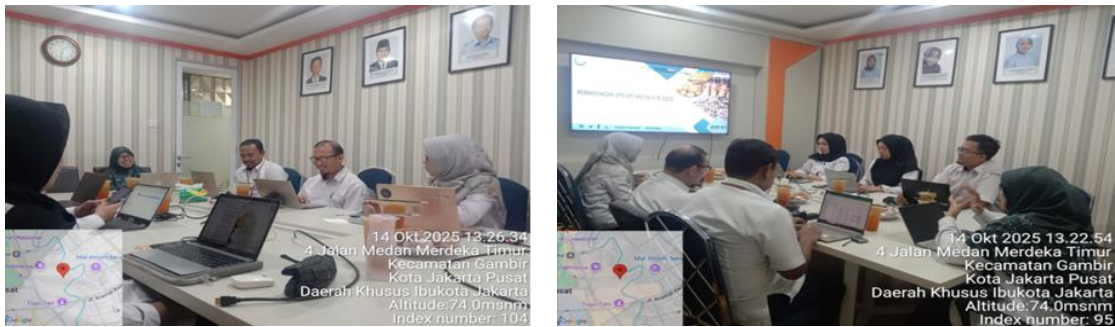
Skala UMKM. Buku ini akan disusun dengan format ringkas dan menggunakan data visual agar mudah dipahami. Struktur buku mencakup pendahuluan, profil umum UPI, klasifikasi produk menurut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 119 Tahun 2021, analisis daya saing, rencana pengembangan, dan lampiran data. Buku ini akan menyajikan berbagai jenis kegiatan pengolahan hasil perikanan dan dilengkapi dengan informasi tentang produk, kode ID, jenis kegiatan, serta pelaku usaha UPI skala UMKM. Dokumentasi foto akan diambil dari dua sumber utama dan harus berkualitas baik. Pembagian tugas penyusunan buku juga telah disepakati. Kesimpulan rapat mencakup finalisasi format buku, referensi pada kebijakan yang ada, pengelolaan dokumentasi foto, dan target penyusunan draf awal.



Gambar 29. Profiling Industri Pengolahan Hasil Perikanan

2. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar TW III Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Gedung Mina Bahari III Lantai 12a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dihadiri Perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP dan Anggota Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas progres hasil cleansing data VPO MB triwulan 1 dan 2 karena adanya anomali data serta progres hasil cleansing VPO triwulan 3 yang bersumber dari data lalu lintas Badan Karantina Indonesia. Penghitungan VPO UPI MB dilakukan setiap triwulan menggunakan data lalu lintas domestik dan ekspor dari Badan Karantina Indonesia (BKI) dan BPPMHKP KKP. Hasil triwulan 1 dan 2 masih dalam proses cleansing karena adanya anomali data, sementara triwulan 3 telah tersedia data lalu lintas domestik, ekspor, dan pengiriman rumput laut. Untuk mengatasi anomali, diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan BKI melalui rapat khusus membahas data lalu lintas domestik dan ekspor.



Gambar 30. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar

3. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar TW III Tahun 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Gedung Mina Bahari III Lantai 12a. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dihadiri Perwakilan Tim Kerja Data dan Layanan Publik, Setditjen PDSPKP dan Anggota Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melanjutkan perhitungan bersama volume produk olahan ikan unit pengolahan ikan skala menengah besar (VPO UPI MB) triwulan III. Tahap perhitungan bersama yang dilakukan masih berfokus pada pemetaan produk/komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan olahan. Perhitungan Volume Produk Olahan (VPO) pada Unit Pengolahan Ikan skala menengah besar (UPI MB) untuk triwulan III telah dilaksanakan, dengan fokus utama pada pemetaan produk dan komoditas ke dalam 13 jenis kegiatan olahan. Dalam proses ini, telah tersedia data lalu lintas dari Badan Karantina Indonesia, meliputi data domestik, ekspor, dan pengiriman rumput laut, serta data ekspor dari BBPMHKP KKP sebagai acuan perhitungan. Berdasarkan hasil tahap ini, rencana tindak lanjut mencakup analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi tren dan anomali data, guna mendukung akurasi dan validitas penghitungan VPO pada triwulan berikutnya.



Gambar 31. Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar

4. Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025

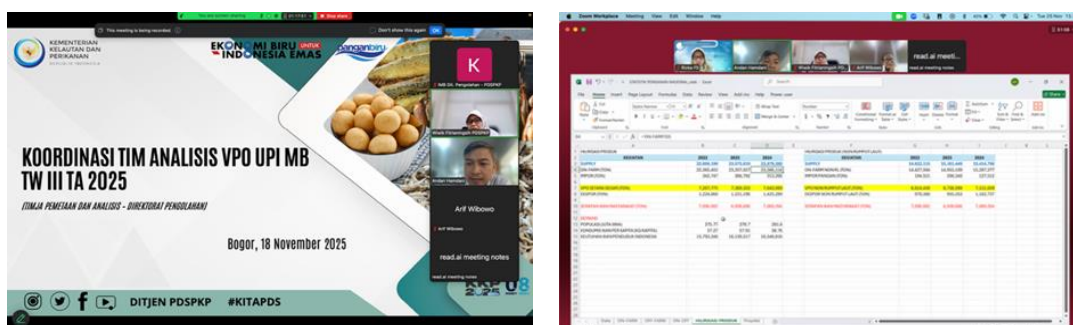
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan Direktorat Pengolahan, dihadiri anggota Tim Analisis yang berasal dari BPS, BKI, BPPMHKP dan Setditjen PDSPKP, perwakilan Timja Pembinaan Pengolahan Hasil serta anggota Timja Pemetaan dan Analisis Pengolahan Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas hasil penghitungan sementara, mendapatkan gambaran untuk analisis awal atas hasil penghitungan sementara VPO UPI MB TW II Tahun 2025 serta review terhadap metode penghitungan yang dilakukan. Rapat koordinasi membahas penghitungan sementara VPO UPI MB TW II Tahun 2025 sebesar 956.162.032 kg setara produk, dengan trend penurunan di bulan 2 dan kenaikan di bulan 3, serta meninjau metode penghitungan yang digunakan. Diskusi menekankan perlunya data lalu lintas ekspor dari BPPMHKP setiap triwulan, potensi kerjasama untuk mendapatkan data kapasitas UPI MB, serta pendalaman data lalu lintas domestik terutama pada penanganan ikan segar, pengolahan rumput laut, pembekuan, dan pendinginan/pengesan ikan yang meningkat signifikan dibanding 2 tahun terakhir. Metode penghitungan tetap memasukkan produk antara dan pelaku usaha perorangan dengan transaksi di atas 10 ton. Tindak lanjut yang perlu dilakukan yaitu analisis lebih mendalam terhadap tren bulanan VPO, pendalaman pengolahan data domestik untuk mendekati trend tahunan, pengusulan forum data lintas Direktorat di Ditjen PDSPKP, serta penyelesaian angka VPO hingga TW III dan prognosa TW IV pada akhir 2025.



Gambar 32. Koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025

5. Kunjungan Lapang dalam Rangka Profiling Food Loss and Waste pada Unit Pengolahan Ikan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Data Direktorat Pengolahan dan dihadiri anggota Timja serta anggota Tim Analisis dari IPB University. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas rencana substansi pada analisis atas hasil penghitungan VPO UPI MB Tahun 2025. Diskusi menekankan analisis awal terhadap lonjakan VPO bulan Maret terkait peningkatan penangkapan ikan menjelang Hari Raya Idul Fitri. Analisis akan menyandingkan data produksi hulu per bulan dengan data olahan untuk melihat tren dominan per jenis produk dan menghitung persentase serapan bahan baku industri pengolahan dibandingkan produksi tangkap dan budidaya. Tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup penghitungan lanjutan VPO dan utilitas UPI MB tahun 2025 serta FGD terhadap hasil analisis dan penghitungan VPO hingga Triwulan III, dengan melibatkan Direktorat Pemasaran dan Setditjen PDSPKP.

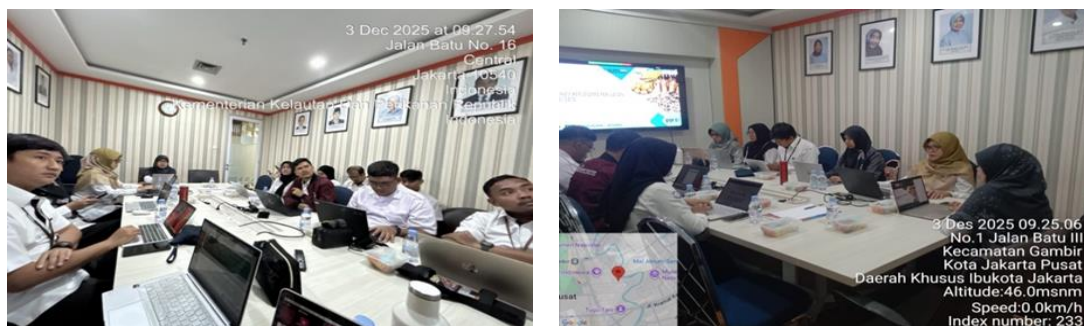


Gambar 33. Kunjungan Lapang dalam Rangka Profiling Food Loss and Waste pada Unit Pengolahan Ikan

6. Koordinasi Rencana Perluasan Berbagi Data dalam Rangka Penghitungan Utilitas

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2025 di Ruang Rapat Pembinaan Mutu Gedung Mina Bahari III Lantai 12a. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari Pusdatin KKP, BPPMHKP dan Setditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah kebutuhan data guna peningkatan kualitas pendataan di Direktorat Pengolahan Ditjen PDSPKP. Direktorat Pengolahan memiliki dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu utilitas industri pengolahan produk KP (%) dan volume produksi olahan KP (VPO). Saat ini, penghitungan VPO UPI MB mengandalkan data lalu lintas ikan dari BPPMHKP KKP dan BKI, sedangkan kapasitas produksi terpasang

dikumpulkan mandiri oleh UPI karena keterbatasan anggaran. Dari 1.480 UPI MB, baru 77 data kapasitas yang masuk hingga 3 Desember, sehingga diperlukan kerja sama dengan Eselon I lain untuk memperkaya data dan mengurangi beban pelaku usaha. Aplikasi HONEST milik BPPMHKP yang digunakan untuk sertifikasi HACCP memiliki berbagai atribut data, termasuk kapasitas produksi, tenaga kerja, lokasi, dan informasi perusahaan, yang diusulkan untuk dibagikan kepada Direktorat Pengolahan. Koordinasi lebih lanjut dengan BPPMHKP diperlukan sebelum permintaan tarik data resmi ke Pusdatin. Tindak lanjut yang perlu dilakukan mencakup konfirmasi atribut data dengan BPPMHKP dan permohonan penarikan data melalui nota dinas.

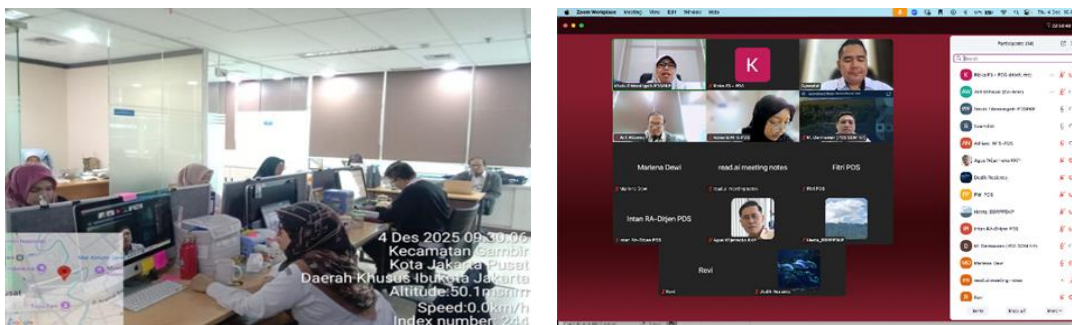


Gambar 34. Koordinasi Rencana Perluasan Berbagi Data dalam Rangka Penghitungan Utilitas

7. Rapat Koordinasi Rencana Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2025 melalui *zoom meeting*. Rapat dipimpin oleh Katimja Pemetaan dan Analisis Pengolahan dan dihadiri oleh Tim Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2023 dari Puskajis dan BPPSDMKP, serta perwakilan Timja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah membahas rencana kegiatan penghitungan susut hasil perikanan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029, hasil perhitungan susut hasil perikanan 2023, dan ketersediaan anggaran. Susut hasil perikanan merupakan bagian dari susut dan sisa pangan (SSP) yang menjadi prioritas nasional dalam mendukung swasembada pangan. Hasil kajian Bappenas (2000–2019) menunjukkan SSP per kapita 115–184 kg/tahun, dengan ikan berkontribusi 9%. Dalam RPJMN 2025–2029, SSP ditargetkan berkurang 3–5% per tahun, dengan harapan penurunan 75% pada 2045. Untuk penghitungan susut hasil perikanan 2026, metode EFLAM yang digunakan pada 2023 akan tetap diterapkan.

Beberapa masukan utama meliputi: fokus pada susut hasil terkait proses bisnis, penentuan komoditas prioritas seperti tuna, koordinasi dengan Ditjen Perikanan Tangkap agar data tersinergi, pengambilan sampel berbasis kluster wilayah agar representatif, koordinasi dengan Bappenas agar selaras dengan RPJMN, dan penyusunan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi susut hasil. Tindak lanjut mencakup koordinasi dengan pihak terkait serta penyusunan konsep penghitungan susut hasil perikanan 2026 yang disesuaikan dengan anggaran tersedia.



Gambar 35. Rapat Koordinasi Rencana Penghitungan Susut Hasil Perikanan Tahun 2026

8. Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2025 secara Luring di Ruang Pembinaan Hasil Kelautan dan Perikanan, Lantai 12 A, Gedung Mina Bahari III. Kegiatan dipimpin oleh Ketua Tim Kerja Penanganan dan Pengolahan Hasil dan dihadiri oleh Tim Kerja Data dan Layanan Publik Setditjen PDSPKP, Pusat Data dan Statistik Setjen KKP, serta Tenaga Ahli dari akademisi Universitas Padjadjaran (UNPAD). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menyepakati sumber data, penanggung jawab, serta alur pengolahan data yang akan digunakan dalam penyusunan prognosa VPO IMK Tahun 2025 dan laporan pendukung lainnya. Dengan adanya koordinasi antara Tim Kerja Data, Direktorat Pengolahan, Pusat Data dan Statistik Setjen KKP, serta Tenaga Ahli dari akademisi, diharapkan hasil prognosa dan laporan yang dihasilkan dapat menjadi dasar yang akurat dan kredibel dalam pengambilan kebijakan ke depan.



Gambar 36. Monitoring dan updating pendataan VPO skala mikro dan kecil tahun 2025 (SMT I tahun 2025)

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya, telah dilaksanakan kegiatan koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh perwakilan dari BPPMHKP dan BKI, sehingga dapat dilakukan analisis atas hasil penghitungan sementara VPO UPI MB, review terhadap metode penghitungan yang dilakukan, serta koordinasi pemenuhan data. Selain itu dilakukan pembahasan progress penghitungan VPO Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 21 Oktober 2025.

Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan

IK 2. Volume Produksi Olahan Perikanan

Produksi Olahan KP adalah volume produk olahan (VPO) hasil perikanan yang dihasilkan oleh unit pengolahan ikan skala mikro, kecil (MK) dan skala menengah besar (MB). Capaian VPO pada periode penghitungan merupakan angka prognosa. Capaian akhir VPO akan tersedia pada T+1.

Penghitungan VPO skala Menengah Besar dilakukan melalui penarikan data volume dan jenis produk UPI Skala Menengah Besar (UPI MB) yang tercatat dalam data BPPMHKP dan Badan Karantina Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi data ekspor dan domestik keluar. Data lalu lintas ikan digunakan sebagai pendekatan dalam penghitungan VPO UPI MB, karena menyediakan data volume dan jenis produk olahan yang diproduksi oleh UPI MB. Penghitungan VPO skala mikro menggunakan data yang diperoleh dari pendataan Produksi Olahan UPI MK kemudian diolah. Pendataan dilakukan terhadap 13 (tigabelas) jenis kegiatan UPI meliputi: 1)

pendinginan/pengesan ikan, 2) pembekuan ikan, 3) penggaraman/pengeringan ikan, 4) pemindangan ikan, 5) pengasapan/ pemanggangan ikan, 6) peragian/fermentasi ikan, 7) pengalengan ikan, 8) pengolahan berbasis lumatan daging ikan/jelly ikan atau surimi, 9) pengolahan kerupuk ikan, kripik, peyek ikan, 10) pembuatan minyak ikan, 11) pengolahan rumput laut, 12) penanganan ikan, dan 13) pengolahan ikan lainnya. Data yang disajikan adalah data volume produk olahan.

Tabel 4. Ikhtisar Pencapaian Volume Produksi Olahan Perikanan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Persentase Realisasi Terhadap Pertumbuhan Thd Realisasi 2025
Volume Produksi Olahan Perikanan	2025	3.71	3.78	101.89	3.71	4,37	3.78	101,89	86,49	

Capaian indikator kinerja Volume Produksi Olahan Perikanan adalah 3,78 Juta Ton (prognosa), atau setara dengan 101,89% dari target tahun 2025 sebesar 3,71 Juta Ton. Indikator kinerja ini merupakan indikator kinerja yang bersifat semesteran. Jika capaian tahun 2025 dibandingkan dengan target Renstra tahun 2025 maka setara dengan 98,15% dari target sebesar 3,71 Juta Ton, dan jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 setara dengan 86,49% dari target sebesar 4,37 Juta Ton. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun target akhir periode 2025-2029 belum sepenuhnya tercapai, capaian kinerja berada pada jalur yang positif (*on track*) menuju pemenuhan target Renstra 2029. Indikator ini merupakan indikator kinerja baru pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama periode Renstra 2025-2029. Oleh karena itu capaiannya belum dapat dibandingkan baik dengan capaian pada triwulan sebelumnya pada tahun berjalan maupun dengan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Alokasi anggaran IK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan merupakan gabungan dari empat kegiatan (RO) mengacu pada dokumen rencana evaluasi rencana aksi yang telah ditetapkan ada empat kegiatan, yaitu,

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 354.978.000,- dengan realisasi penyerapan anggaran pada Triwulan IV Tahun 2025 sebesar Rp 354.910.196,- atau sebesar 99,98% dari pagu anggaran pasca blokir. Efisiensi anggaran IK tersebut adalah realisasi IKU sebesar 101,89% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,98 sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,91%.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung indikator kinerja di atas antara lain :

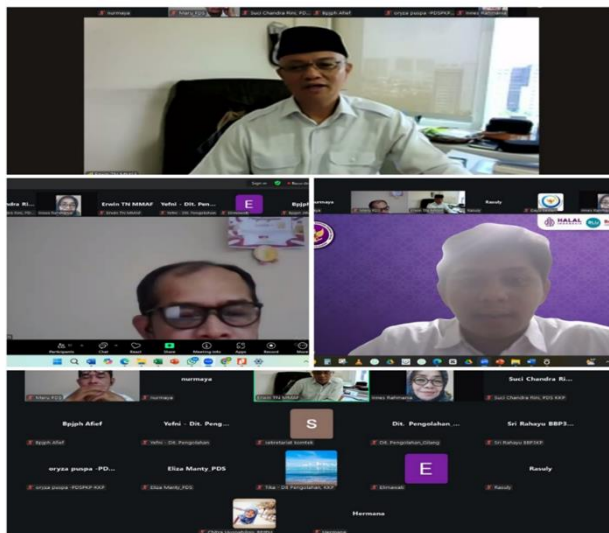
A. Perumusan RSNi Produk Perikanan

Tahapan perumusan Rancangan SNI produk perikanan meliputi RSNi1, RSNi2, RSNi3, Penyampaian RSNi ke BSN. Perumusan rancangan SNI dilakukan oleh Komite teknis yang dikelola oleh Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 3 dokumen dengan target sebesar 3 dokumen, yaitu Pedoman pengujian sensori pada hasil perikanan, Pempek, Agar-agar kertas, dan Kerupuk krustasea, ikan, dan moluska siap makan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka Perumusan RSNi Produk Perikanan, yaitu:

1. Rapat pembahasan rancangan Nota Kesepahaman antara BPJPH dengan KKP

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal dilaksanakan 14 Oktober 2025 secara daring, dibuka oleh Katimja Pengembangan dan Penerapan Standar dan diikuti perwakilan dari BPJPH, Biro Hukum Setjen KKP, Biro Perencanaan Setjen KKP, perwakilan eselon lingkup Ditjen PDSPKP, BBP3KP, Setdijen PDSPKP, dan Tim Kerja lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah dalam rangka percepatan sertifikasi halal produk kelautan dan perikanan. Hasil diskusi mencakup beberapa poin penting. BPJPH dan instansi terkait mendukung sertifikasi halal untuk produk UMK. Ada kebutuhan untuk mengenal lebih jauh tentang tugas BPJPH dalam kerjasama ini. Dinarasikan pula soal pentingnya membuat PKS antara Ditjen PDSPKP dan unit terkait di BPJPH, tanpa melibatkan sektor hilir. BPJPH saat ini belum memiliki PKS dengan kementerian lain terkait sertifikasi halal. Rapat akan dilaporkan ke pimpinan untuk arahan lebih lanjut mengenai PKS

atau MoU. Direktorat Pengolahan akan menyiapkan rancangan PKS dan menginisiasi pembahasan lanjutan.



Gambar 37. Rapat pembahasan rancangan Nota Kesepahaman antara BPJPH dengan KKP

2. Rapat Teknis (RSNI2) CPGB dengan Metode Evaporasi Terbuka

Kegiatan berlangsung dari tanggal 15-18 Oktober 2025 di Kedai Reka Cipta Garam (KRCG) Kab. Pamekasan yang merupakan Pusat Riset dan Pengembangan Garam Fakultas Univ. Trunojoyo Madura. Tim diterima oleh ketua KRCG (Prof. Makhfud Efendy) sebagai ketua KRCG dan Tim Ahli pada Penyusunan SNI CPGB yang menjelaskan tahapan produksi atau prosedur yang untuk menghasilkan garam dengan hasil maksimal dan kualitas sesuai standar. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menggali metode produksi garam yang terbukti efektif dan efisien di lapangan untuk dijadikan acuan dalam penyusunan standar serta memastikan bahwa standar yang disusun relevan dan dapat diaplikasikan oleh para petani garam. Hasil Rapat Teknis (RSNI2) CPGB dengan Metode Evaporasi Terbuka berlangsung dari 15 hingga 18 Oktober 2025. Kegiatan dimulai dengan kunjungan tim ke Kedai Reka Cipta Garam (KRCG) di Pamekasan, yang dipimpin oleh Prof. Makhfud Efendy. Tujuannya adalah untuk menggali metode produksi garam yang efisien dan relevan bagi petani garam. KRCG telah mengembangkan berbagai jenis garam dan menekankan pentingnya memenuhi SOP produksi untuk menghasilkan garam berkualitas. Rapat dilaksanakan hybrid di UIN Madura dengan berbagai pihak yang ikut serta. Direktur Pengolahan mengungkapkan bahwa penyusunan SNI Garam mendukung target swasembada garam pada

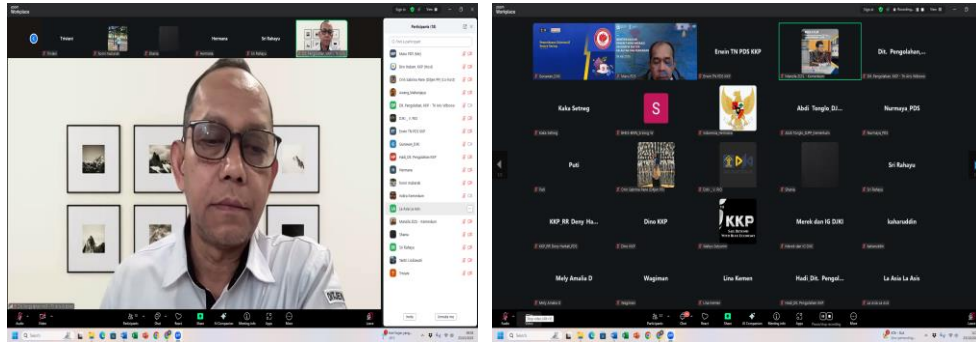
2027. Pembahasan terhadap SNI sudah memasuki tahap 2, namun masukan dari anggota perlu disempurnakan sebelum ditetapkan. Tindak lanjut termasuk perbaikan RSNI1 dan penjadwalan rapat teknis selanjutnya.



Gambar 38. Rapat Teknis (RSNI2) CPGB dengan Metode Evaporasi Terbuka

3. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman

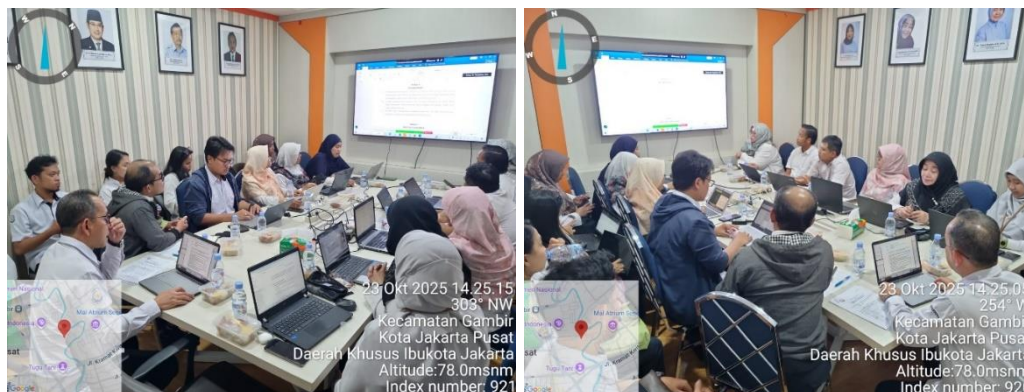
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 25-30 September 2025, secara online. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan dari beberapa instansi dan petugas enumerator dari Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan monitoring dan updating data Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan, serta menyinkronkan dan mengidentifikasi kendala dalam pendataan. Pendataan dilakukan oleh petugas enumerator yang mengikuti pedoman resmi. Monitoring dibagi dalam empat wilayah provinsi, dengan tim yang terdiri dari validator dan enumerator. Namun, beberapa provinsi belum mengirimkan dokumen dan melakukan validasi data. Kendala yang dihadapi termasuk pergantian petugas, data yang belum mutakhir, kendala sistem input data, serta efisiensi anggaran. Sehingga diperlukan koordinasi untuk mempercepat pengumpulan data, sosialisasi terkait penginputan data, dan validasi nasional oleh Pusdatin KKP pada M-4 Oktober 2025.



Gambar 39. Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan serta Pergaraman

4. Rapat Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama Ditjen PDSPKP dan Sekretarat Utama BPJH

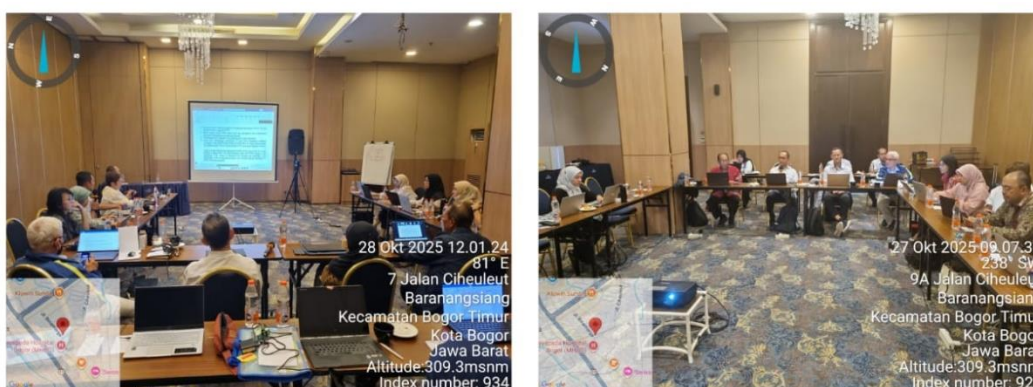
Kegiatan dilaksanakan pada 23 Oktober 2025 di ruang rapat pembinaan mutu Lt. 13 GMB 3. Kegiatan dipimpin oleh Direktur Pengolahan, dan dihadiri oleh JFT Utama Pembina Mutu (bu Innes), perwakilan eselon 2 Lingkup Ditjen PDSPKP, BBP3KP (*online*), Timja Kerjasama dan Humas Sesditjen PDSPKP, Timja Hukum Sesditjen PDSPKP dan timja lingkup Direktur Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Pembahasan draft PKS Sertifikasi halal antara KKP dan BPJP sebagai tindaklanjut rapat pembahasan draft MoU yang dilaksanakan 14 Okt lalu yang mengusulkan dibuat dalam bentuk PKS. Draft telah dibahas mengenai judul, isi, dan lampiran yang berfokus pada Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, serta Rencana Aksi. Beberapa masukan mencakup pengubahan judul menjadi "Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk KP Usaha Pengolahan Ikan Skala Mikro dan Kecil". Ruang lingkup meliputi beberapa kegiatan seperti fasilitasi pembentukan lembaga pemeriksa halal dan peningkatan kompetensi SDM. Diperlukan penjabaran rinci tentang peran setiap pihak pada lampiran Rencana Aksi. Timja Standardisasi akan merapikan draft sesuai masukan dan berencana membahas dengan BPJPH di minggu kedua November.



Gambar 40. Rapat Pembahasan Rancangan Perjanjian Kerjasama Ditjen PDSPKP dan Sekretarat Utama BPJH

5. Rapat Teknis Lanjutan RSNi2 CPBG dengan Metode Evaporasi Terbuka

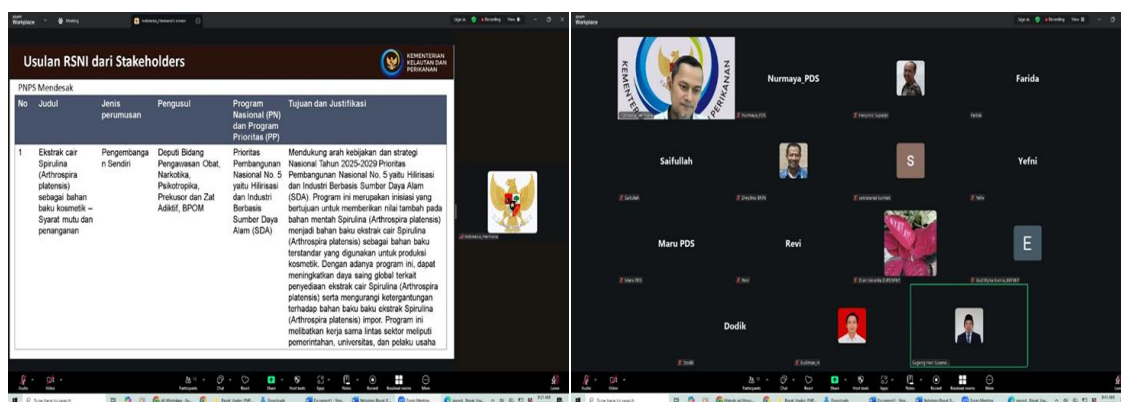
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 - 28 Oktober 2025 secara *hybrid* (daring dan luring), bertempat di D'Anaya Hotel Bogor. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Direktur Pengolahan selaku Ketua Komtek 65-05, serta dihadiri oleh perwakilan BSN, konseptor, tenaga ahli garam, anggota komtek 65-05; Produk Perikanan, serta perwakilan Timja Garam dari Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah penyusunan RSNi2 terkait Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik dengan Metode Evaporasi Terbuka. Substansi pembahasan lanjutan ini meliputi : pengelolaan lokasi dan desain dan tata letak, penyiapan lahan baru dan yang sudah operasional, pengelolaan bahan baku dan sarana produksi, tahapan produksi garam dengan metoda evaporasi terbuka, higiene pekerja serta laporan pemeriksaan kesesuaian CPBG. Berdasarkan hasil dari diskusi, Komite Teknis menyepakati hasil pembahasan tersebut sebagai hasil RSNi2 yang dapat dijadikan bahan pada rapat Konsensus RSNi3.



Gambar 41. Rapat Teknis Lanjutan RSNi2 CPBG dengan Metode Evaporasi Terbuka

6. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Produk Perikanan Non Pangan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025, secara daring melalui *zoom meeting*. Rapat dibuka oleh PJ Timja Pengembangan dan Penerapan Standar Produk Kegiatan dihadiri Perwakilan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) - Ditjen PDSPKP, Anggota Komite Teknis 65-08: Produk Perikanan Nonpangan dan Tim Kerja Lingkup Direktorat Pengolahan - Ditjen PDSPKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menjaring masukan terhadap usulan PNPS Produk Perikanan Non Pangan untuk ditetapkan sebagai PNPS 2026. Beberapa masukan dari peserta rapat mencakup usulan PNPS agar mempertimbangkan saran stakeholder untuk implementasi RSNi dan prioritas revisi berdasar urgensi. Dua RSNi baru diterima, yakni RSNi Ekstrak spirulina dan RSNi Tepung ikan. Penting untuk memastikan parameter dan laboratorium pengujian terutama untuk antioksidan *ethoxyquin*. Diskusi mendalam dengan ASBUMI dan menyiapkan dokumen usulan RSNi untuk BSN juga diperlukan.

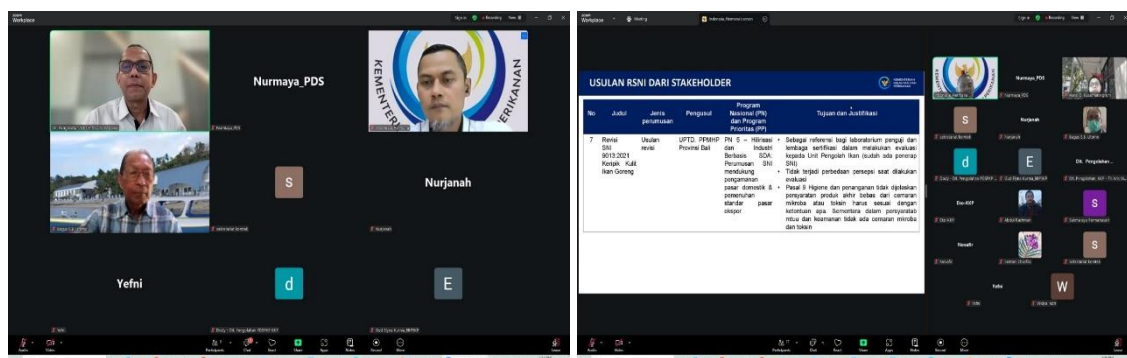


Gambar 42. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) Produk Perikanan Non Pangan

7. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 2026 Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan, Ditjen PDSPKP, dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Prasarana dan Sarana, Ditjen PDSPKP, Perwakilan Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan (BBP3KP) - Ditjen PDSPKP dan Anggota Komite Teknis 65-05: Produk Perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menjaring masukan dari anggota komtek serta

peserta rapat sehingga usulan PNPS dapat diusulkan ke BSN pada tanggal 31 Oktober 2025 dengan prioritas dan justifikasi yang tepat. Hasil rapat menyatakan bahwa pengusulan PNPS harus mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan permasalahan saat ini, urgensi, dukungan terhadap program pemerintah, nilai ekonomis, dan masa berlaku yang lebih dari 5 tahun. Masukan terkait kebijakan SNI menyebutkan bahwa pengusul harus bertanggung jawab atas pembiayaan. Usulan untuk merevisi SNI filet ikan patin juga disampaikan. BPP3KP belum mengajukan PNPS karena fokus pada Layanan Pengujian. Lima RSNi Produk Perikanan diusulkan sebagai PNPS 2026, dan dokumen usulan RSNi akan dikirim ke BSN.

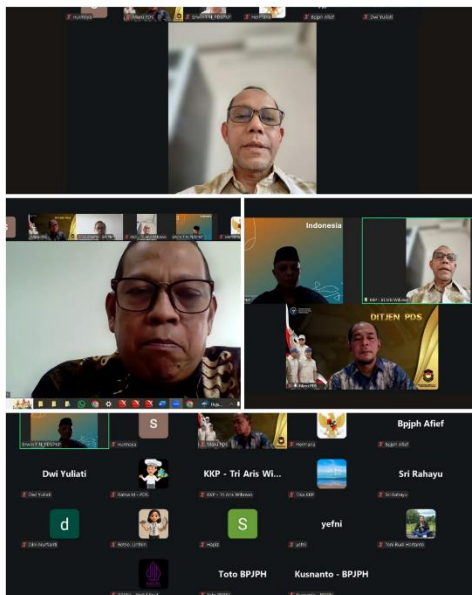


Gambar 43. Rapat Usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) 2026 Produk Perikanan

8. Rapat pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Sertifikasi Halal Produk Kelautan dan Perikanan skala usaha mikro dan kecil

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2025 secara daring. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan, dihadiri oleh Direktur Pengawasan Jaminan Produk Halal BPJPH, perwakilan unit es 2 terkait lingkup BPJPH, BHO dan biro kerjasama BPJPH, timja kerjasama setditjen PDS, perwakilan Es 2 lingkup PDS dan Timja lingkup Dit. Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama tentang Sertifikasi Halal Produk Kelautan dan Perikanan untuk memastikan kesesuaian substansi pada draft PKS. Rapat membahas draft PKS dari judul hingga lampiran renaksi, namun belum sempat membahas point 3-5. Beberapa catatan penting dari rapat termasuk perlunya mencari judul alternatif yang lebih tepat, penandatanganan PKS dapat didelegasikan jika dirjen PDS tidak hadir, dan dukungan BPJPH terkait definisi sertifikasi halal. Ruang lingkup pembentukan LPH diubah menjadi penguatan LPH. BPJPH akan memberikan dukungan teknis dan fasilitasi sertifikasi halal

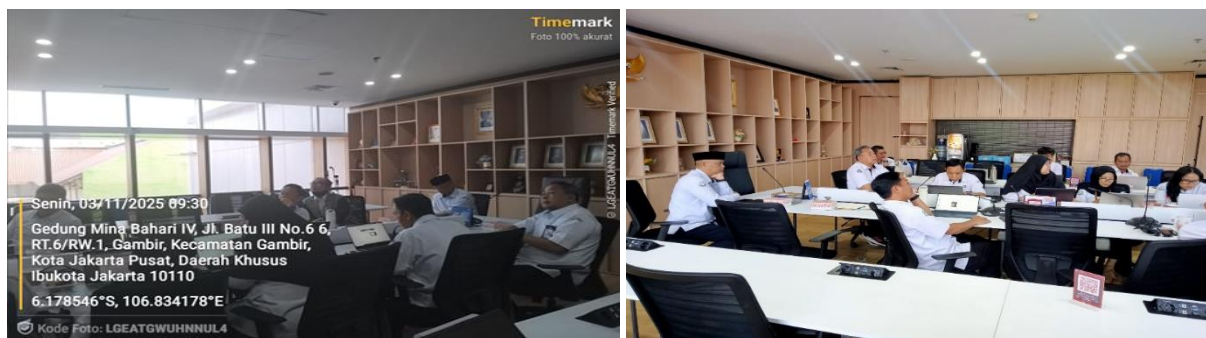
tanpa melakukan pemeriksaan. Timja Standar akan merapikan draft dan menjadwalkan rapat lanjutan untuk finalisasi.



Gambar 44. Rapat pembahasan draft PKS tentang Sertifikasi Halal Produk Kelautan dan Perikanan skala usaha mikro dan kecil

9. Rapat Pembahasan Rancangan Permen KP Tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan Serta Pergaraman

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2025 di Ruang rapat Biro Hukum KKP Lt. 3B KKP. Kegiatan dihadiri Biro Hukum Setjen KKP, Setditjen PDSPKP, Direktorat Pemberdayaan Usaha, Direktorat Pengolahan, JFT Pembina Mutu Ahli Utama Direktorat Pengolahan, Direktorat Prasarana dan Sarana. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan pengecekan kembali secara menyeluruh rancangan Peraturan Menteri KP yang telah dinyatakan Harmon saat rapat Harmonisasi 23 Oktober 2025. Hal ini dilakukan untuk menghindari disharmonisasi rancangan yang sudah memasuki tahapan pengajuan Kembali ke Kemekum untuk dapat ditetapkan. Secara keseluruhan, tidak ada perubahan signifikan pada muatan materi. Beberapa poin penting adalah, judul diubah dari Pembinaan menjadi Pengembangan, konsideran tidak diperbaiki, beberapa istilah dan kalimat diubah untuk konsistensi, bab IV dihapus. Pada penutupan, rancangan dinyatakan jelas dan akan diproses lebih lanjut.



Gambar 45. Rapat Pembahasan Rancangan Permen KP Tentang Indikasi Geografis Hasil Kelautan dan Perikanan Serta Pergaraman

10. Survey lapangan ke Tambak Garam Rakyat di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pangkeb dan Kabupaten Jeneponto

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 5-6 November 2025 di tambak garam rakyat di Kab. Rembang, Kab. Pangkeb dan Kab Jeneponto. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menilai apakah standar yang disusun dapat diterapkan dan diterima secara luas di berbagai kondisi tambak garam dengan karakteristik lahan dan geografis beragam di seluruh wilayah produksi garam di Indonesia, mengidentifikasi kondisi real cara produksi garam rakyat sebagai dasar pembinaan dan penyempurnaan RSNI, menyempurnakan ceklist pemeriksaan agar memuat seluruh standar yang disusun serta mudah dipahami oleh responden maupun pemeriksa. Dilakukan pemeriksaan kesesuaian cara produksi garam dengan ceklist RSNI2, meliputi pengelolaan lahan, air laut, panen, sanitasi, dan dokumentasi. Ditemukan ketidaksesuaian di tiga kabupaten, yaitu petambak tidak menggunakan alat ukur salinitas standar, proses produksi tidak memperhitungkan jumlah hari optimal, dan kurangnya pemantauan kualitas air. Selain itu, terdapat beberapa kekurangan infrastruktur dan pelanggaran kebersihan. Saran untuk perbaikan ceklist meliputi fleksibilitas penilaian, penyederhanaan terminologi, dan penyesuaian untuk skala usaha. Tindak lanjut data lapang untuk diskusi RSNI3.



Gambar 46. Survey lapangan ke Tambak Garam Rakyat di Kabupaten Rembang, Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Jeneponto

11. Rapat Teknis RSNi3 Cara Produksi Garam Bahan Baku yang baik (CPBG) dengan Metode Evaporasi Terbuka 2025

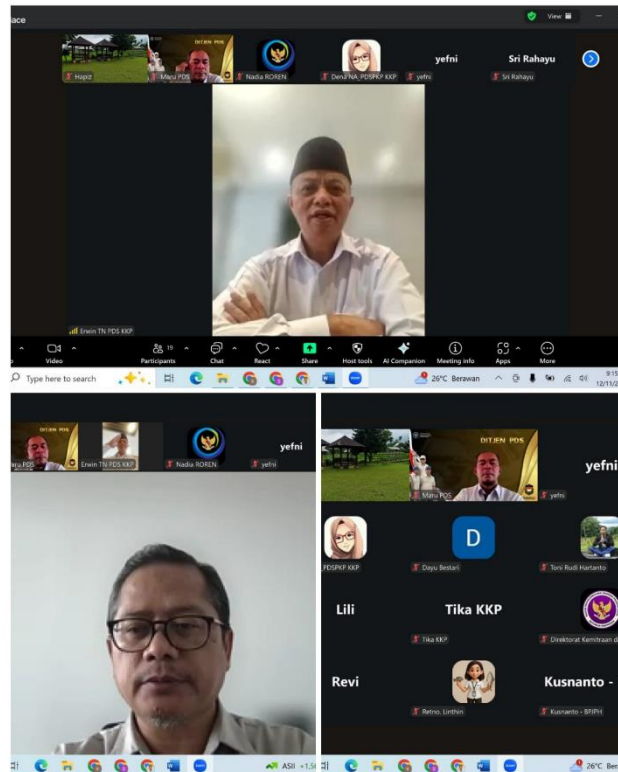
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11 – 12 November 2025 secara *hybrid* di D'Anaya Hotel Bogor dan RSNi3 disepakati secara daring pada tanggal 13 November 2025. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komtek 65-05 (Direktur Pengolahan). Rapat dihadiri oleh anggota Komtek 65-05 Produk Perikanan, Direktur Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan, dan Penilaian Kesesuaian BSN (Dir. PSAKK BSN), Tim Pengendali Mutu Standar Badan Standardisasi Nasional (TPMS BSN), Konseptor, Tenaga Ahli garam, perwakilan Koperasi Sentra Induk Garam Nasional (SIGN), Sekretariat Komtek Teknis 71-02 Garam, serta perwakilan Timja Garam Direktorat Sumber Daya Kelautan, Ditjen Pengelolaan Kelautan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah finalisasi substansi dokumen RSNi3 Cara Produksi Garam Bahan Baku yang Baik dengan Metode Evaporasi Terbuka. Pada pembukaan rapat, Direktur PSAKK BSN menyatakan dukungan untuk penyusunan RSNi CPGB karena garam penting untuk berbagai sektor dan pemerintah menargetkan swasembada. BSN mendukung percepatan penetapan SNI agar dapat segera berlaku. Peserta rapat menyetujui RSNi3 setelah membahas substansi RSNi2 CPBG. Pengendali Mutu Standar BSN menyatakan proses pembahasan memenuhi kuorum, dan RSNi ini akan dilanjutkan ke tahap jajak pendapat. Komtek akan mengirimkan dokumen RSNi3 kepada BSN.



Gambar 47. Rapat Teknis RSN3 CPBG dengan Metode Evaporasi Terbuka 2025

12. Rapat Pembahasan Rancangan PKS Halal

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 12 November 2025 secara online. Kegiatan dihadiri oleh Direktorat kemitraan dan Kerjasama BPJPH, unit Teknis BPJPH terkait, BHO BPJPH, perwakilan Roren KKP, bagian Kerjasama dan Humas Ditjen PDSPKP, perwakilan Eselon 2 lingkup PDSPKP, BBP3KP dan lingkup Direktorat Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah mengkonfirmasi dan menyisir kembali semua muatan rancangan PKS secara menyeluruh untuk sinkronisasi tugas dan fungsi para pihak. Hasil rapat pembahasan PKS menyepakati judul mengenai penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan melalui sertifikasi halal. BPJPH mengusulkan pembuatan MoU sebagai payung hukum PKS yang mencakup hulu hilir. Ruang lingkup mencakup penguatan LPH, pembinaan dan pendampingan produk halal, diseminasi kebijakan, peningkatan kompetensi SDM, serta pertukaran data. PKS berlaku selama 3 tahun dan sertifikasi halal untuk usaha kecil harus melalui kunjungan lapang. Tindak lanjut termasuk merapikan catatan rapat dan mengkoordinasikan finalisasi draf PKS.



Gambar 48. Rapat Pembahasan Rancangan PKS Halal

13. Rapat Usulan BBP3KP Sebagai Lembaga Pendamping Teknis LSPro

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 November 2023 melalui *zoom meeting*. Kegiatan dihadiri oleh Rapat dibuka oleh Katimja Standardisasi dan dihadiri oleh perwakilan Tim Kerja SDMA, Organisasi Tata Laksana dan RB serta Timja lingkup Dit. Pengolahan. Tujuan pelaksanaan kegiatan sebagai tanggapan atas surat dari Kepala BBP3KP perihal usulan BBP3KP menjadi Lembaga Pendamping Teknis LSPro untuk SNI Tuna dan SNI Sarden serta Makerel dalam Kemasan Kaleng. Rapat ini merespons surat dari Kepala BBP3KP yang mengusulkan BBP3KP menjadi Lembaga Pendamping Teknis LSPro untuk SNI Tuna dan SNI Sarden serta Makerel dalam Kemasan Kaleng. Dalam rapat, peserta menyampaikan beberapa tanggapan, seperti tidak adanya amanah dalam Permen KP 32 Tahun 2023 untuk membentuk Lembaga Pendamping LSPro dan bahwa pembinaan seharusnya dilakukan oleh Direktorat Pengolahan berdasarkan NSOP. Terdapat juga kekhawatiran mengenai konflik kepentingan jika BBP3KP terlibat dalam pendampingan, serta pentingnya membedakan tugas antara Pusat dan UPT dalam pembinaan LSPro.

14. Pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indigeo di Kabupaten Magelang

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 18-19 November 2025 di Pendopo Warung Mangut Pintjoe. Kegiatan dihadiri oleh berbagai perwakilan dari pemerintahan dan pelaku usaha. Pembukaan dilakukan oleh kepala bidang Balitbangda Bappeda Kabupaten Magelang, yang mengapresiasi kehadiran tim ahli untuk memperbaiki dokumen yang telah disusun sebelumnya. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah melakukan asistensi pendampingan penyusunan dokumen deskripsi ikan beong dan mangut beong. Materi yang disampaikan mencakup pengembangan indikasi geografis hasil kelautan dan perikanan, termasuk pengertian, manfaat, konsepsi, serta tahapan pengembangan dan penyusunan dokumen deskripsi. Dalam sesi pendampingan, beberapa catatan penting yang disampaikan termasuk perlunya penyempurnaan draft dokumen untuk disesuaikan dengan juknis DJKI, serta pembentukan pengurus MPIG yang belum disetujui. Nama MPIG disepakati menjadi Paguyuban Pelaku Usaha Ikan Beong Kabupaten Magelang, mengingat mangut Beong hanya adalah masakan dan bukan produk yang dapat diberi label. Bappeda dan pelaku usaha sepakat untuk mempertahankan nama Kabupaten dalam indikasi geografis. Ikan Beong Kabupaten Magelang telah memiliki logo, yang perlu dijelaskan maknanya. Balitbangda Bappeda berencana untuk segera memperbaiki dokumen dan menindaklanjuti proses penetapan MPIG. Diharapkan pendaftaran dapat dilakukan sebelum akhir November 2025 dengan dukungan dari Kanwil Hukum.



Gambar 49. Pendampingan penyusunan dokumen deskripsi indigeo di Kabupaten Magelang

15. Pemantauan Penerapan SNI oleh UKM Perikanan di Kota Bogor

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27-28 November 2025 di Kota Bogor. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Identifikasi dan verifikasi Penerapan Standar Nasional Indonesia. UKM Mimi Zuki memproduksi olahan ikan lele dengan metode zero waste, menghasilkan produk seperti abon dan kerupuk. UKM ini diusulkan untuk naik kelas dan mendapatkan bantuan peralatan, tetapi terkendala oleh hasil uji protein yang belum memenuhi standar SNI. Beberapa saran perbaikan diberikan untuk meningkatkan kandungan protein. UKM Pempek Ameera sudah menerapkan SNI untuk pempek ikan. Meskipun peningkatan produksi masih minim, sertifikasi SNI memberikan kepercayaan lebih dalam pemasaran. UKM berencana untuk memperluas pasar ke ritel modern dan menggunakan ikan berbeda harga untuk produk, namun tetap menawarkan rasa yang sama. UKM juga berharap mendapatkan bantuan untuk pengembangan usaha. UKM Mbah Uti memproduksi produk value added dan akan menerapkan SNI untuk siomay. Mereka mengurus pencantuman merk dan menyadari pentingnya sertifikasi SNI untuk daya saing, serta mendiskusikan sertifikasi lain seperti SKP dan Halal. UKM sudah memperoleh SKP untuk produk siomay dan dimsum. UKM Se'gi memproduksi berbagai produk berbahan tuna, dan telah memperoleh persetujuan SNI untuk produk abon. Namun, proses sertifikasi sempat terhambat oleh pencemaran Salmonella. Produk abon

tuna ini terkenal dengan rasa khas dan memiliki kadar protein tinggi. UKM ini juga ingin menjajaki peluang ekspor ke Malaysia. UKM Nasa Boga, yang telah mendapatkan beberapa sertifikat SNI sejak 2021, memproduksi olahan ikan dari tenggiri dan barakuda. Sertifikat SNI membantu mereka dalam pemasaran, termasuk melalui reseller dan platform online. Kegiatan Gemar Ikan yang melibatkan mereka juga membantu meningkatkan omset di tengah tantangan ekonomi.



Gambar 50. Pemantauan Penerapan SNI oleh UKM Perikanan di Kota Bogor

16. Pemantauan Penerapan SNI di Kabupaten Cianjur

Kunjungan lapangan dilakukan pada tanggal 4-5 Desember 2025 di Kabupaten Cianjur. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk memantau penerapan SNI oleh usaha mikro dan kecil di Kabupaten Cianjur. Kunjungan dilakukan bersama Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan serta penyuluh perikanan. Hasil kunjungan meliputi tiga usaha, (1) Poklahsar Dinari, berdiri sejak 2015 di Desa Sabandar, memproduksi otak-otak ikan dan roll fish. Mempekerjakan 15 orang dan menerapkan SNI 7757:2022, meningkatkan kapasitas produksi dari 7.500 kg menjadi 8.000 kg per bulan. Memiliki sertifikasi dan SOP, namun menghadapi kendala biaya dan akses pasar. Dinari berharap mendapat bantuan akses pasar

dan pelatihan SNI. (2) Nayara 77, didirikan 2020, menghasilkan sambal ikan dan produk lainnya. Mempekerjakan 10 orang dan sudah memiliki beberapa sertifikasi. Memerlukan mesin pengering dan alat pengukur pH untuk pengembangan usaha. (3) Mina Karya Mandiri, berdiri 2015, memproduksi berbagai produk perikanan dan memerlukan chest freezer serta akses pasar. Pemilik berkomitmen untuk memenuhi semua sertifikasi serta penerapan SNI demi meningkatkan daya saing.

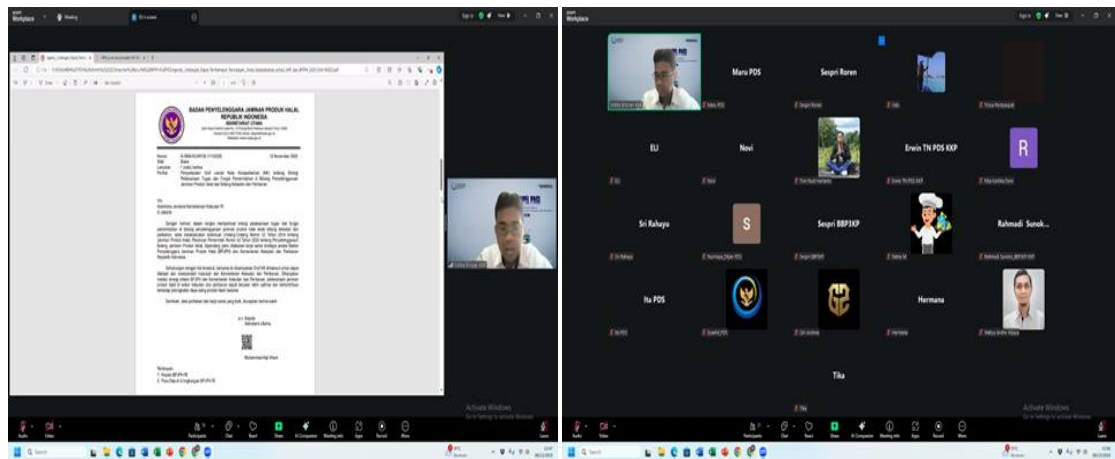


Gambar 51. Pemantauan Penerapan SNI di Kabupaten Cianjur

17. Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Desember 2025 secara daring. Rapat dihadiri oleh berbagai perwakilan dari KKP. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk menanggapi surat dari BPJPH terkait masukan atas rancangan Nota Kesepahaman mengenai Jaminan Produk Halal dan Bidang Kelautan serta Perikanan. Diawali dengan dukungan untuk inisiatif penyusunan MoU, Roren KKP meminta penjelasan tentang latar belakang dan urgensi kerjasama ini. Ditlah Ditjen PDSPKP menjelaskan bahwa inisiatif ini berdasarkan Peraturan Pemerintah yang mewajibkan sertifikasi halal sebelum 18 Oktober 2026. Saat ini, banyak produk olahan dari usaha mikro dan kecil yang belum memiliki sertifikat halal, sehingga kolaborasi diperlukan. Dalam pemaparan draft Nota Kesepahaman, Roren meminta

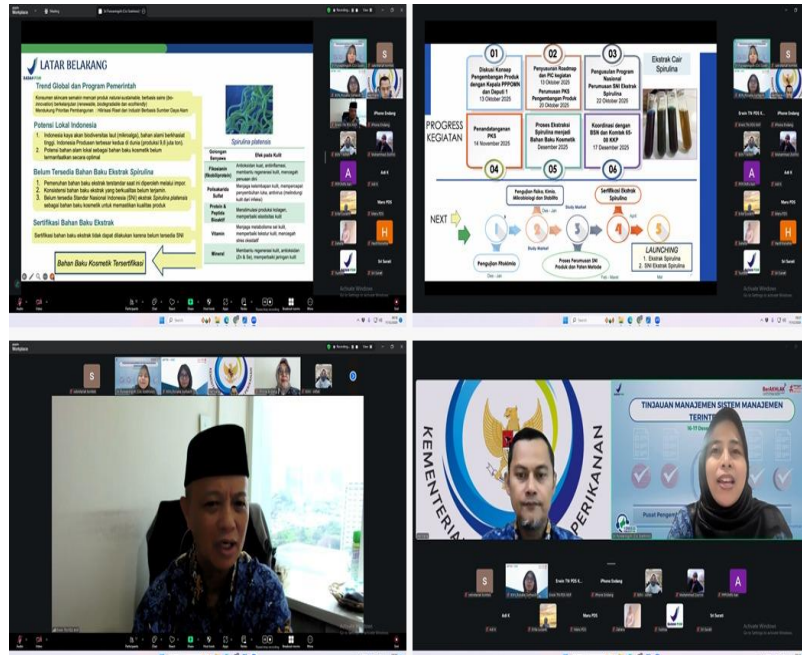
tanggapan dari peserta. Beberapa saran yang disepakati antara lain perubahan judul, penambahan frasa hukum, dan perubahan jangka waktu dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Roren akan menyelesaikan draft MoU tahun 2025 dan berkoordinasi dengan unit eselon 1 lainnya untuk memperbaiki hasil rapat sebelum dikirim ke BPJPH.



Gambar 52. Rapat Pembahasan Rancangan Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

18. Rapat Koordinasi PNPS Mendesak 2026

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2025. Rapat dihadiri oleh perwakilan dari berbagai Lembaga. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk mengoordinasikan usulan PNPS mendesak ekstrak spirulina sebagai bahan baku kosmetik. BSN mendukung proyek ini dan menyatakan bahwa PNPS mendesak harus selesai dalam 6 bulan. PPOMN-BPOM menjelaskan latar belakang dan rencana penyelesaian PNPS dalam waktu 5 bulan, dengan rapat penyusunan konsep direncanakan pada bulan Februari. Tindak lanjut termasuk surat dari Direktorat Pengolahan kepada BSN dan usulan anggota Komtek dari PPOMN-BPOM.



Gambar 53. Rapat Koordinasi PNPS Mendesak 2026

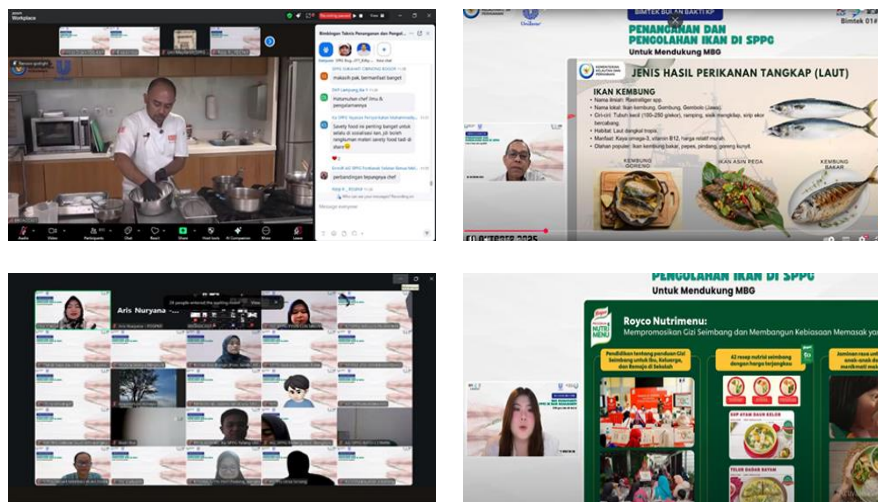
B. Pelaku Usaha yang difasilitasi Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah

Diversifikasi produk merupakan salah satu upaya untuk menambah nilai hasil perikanan sesuai yang diamanahkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 59 tahun 2021 tentang Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perikanan. Diversifikasi produk dilakukan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyesuaikan dengan perkembangan industry dan kebutuhan pasar. Kegiatan tersebut pada tahun 2025 memiliki capaian sebanyak 500 UMKM dengan target 500 UMKM. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung Pembinaan Diversifikasi Produk Bernilai Tambah, yaitu:

1. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sesi 1

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2025 secara daring melalui zoom dan youtube. Kegiatan Bimtek dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan hadir sebanyak 5 000 peserta, 1000 peserta melalui zoom meeting dan 4000 peserta melalui youtube, peserta tersebut berasal dari SPPG di 36 Provinsi, 200 Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman pengelola SPPG terkait penanganan serta pengolahan ikan yang baik, higienis, dan sesuai standar mutu dan keamanan pangan. Mendukung keberhasilan

program nasional MBG melalui penyediaan ragam menu ikan yang berkualitas, aman dikonsumsi, dan bernilai gizi tinggi, serta mendorong pengolahan di SPPG *Good Manufacturing Practices* (GMP) dan *Sanitation Standard Operating Procedure* (SSOP). Dalam kegiatan ini, beberapa materi disampaikan oleh berbagai narasumber tentang pengolahan ikan dan pentingnya kualitas dan keamanan pangan. Penyampaian diikuti dengan demo memasak ikan patin dan gurame menjadi tiga menu bergizi dengan teknik sederhana. Penekanan pada kebersihan dan variasi resep diharapkan bisa menarik minat anak-anak. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman pengelola SPPG dan akan ada evaluasi untuk kegiatan selanjutnya.

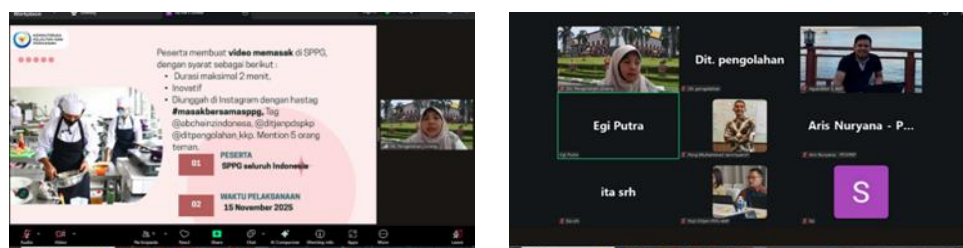


Gambar 54. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG Sesi 1

2. *Forum Group Discussion* (FGD) analisis kesiapan dan kapasitas wilayah dalam penyediaan susu untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 di Hotel Swiss Bellin Wahid Hasyim, Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh BGN dan PT Surveyor Indonesia dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapenas, Kementan, Kemendag, Kemenperin, KKP, BPS, BAPANAS, Kemenkop, Pemda DKI Jakarta, SPPG Jakarta, PERSAGI, Pergizi Pangan, AIPS, GKSI, PT Frisian Flag Indonesia, PT Indolakto, GAIN, FAO dan Pakar bidang ilmu dan teknologi susu (prof Evi Taufik) dan Pakar bidang rantai pasok (Prof Alla Asmara). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah menghimpun perspektif dari pemangku kebijakan nasional, pelaku usaha rantai distribusi pangan, serta organisasi Masyarakat yang terlibat dalam intervensi gizi, konfirmasi hasil analisa awal proyeksi kebutuhan bahan pangan susu, mengidentifikasi permasalahan rantai pasok dalam negeri dari hulu ke hilir, memetakan kebijakan

lintas sektor dan koordinasi antar instansi terkait kebijakan penyediaan bahan pangan susu untuk jangka pendek dan menengah, memetakan pemenuhan kebutuhan protein nasional. Kebutuhan susu di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan sebesar 4,7 juta ton, dengan produksi dalam negeri hanya 1 juta ton dan sisanya diimpor. Sektor kelautan bisa menyediakan protein alternatif, seperti Hidrolisat Protein Ikan (HPI), yang kaya protein dan nutrisi. Beberapa perusahaan telah memproduksi HPI dengan kapasitas bervariasi. HPI dapat menjadi solusi untuk pemenuhan gizi, memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor untuk meningkatkan produksinya.



Gambar 55. *Forum Group Discussion (FGD) analisis kesiapan dan kapasitas wilayah dalam penyediaan susu untuk program MBG*

3. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sesi 2

Kegiatan dilaksanakan pada 22 Oktober 2025 secara daring melalui *zoom meeting* dan youtube. Kegiatan Bimtek dibuka oleh Sesditjen PDSPKP dan hadir sebanyak 5000 peserta, 874 peserta melalui zoom meeting dan 1212 peserta melalui youtube, peserta tersebut berasal dari SPPG di 36 Provinsi, 278 Kabupaten/Kota. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman pengelola SPPG terkait penanganan serta pengolahan ikan yang baik, higienis, dan sesuai standar mutu dan keamanan pangan, khususnya pada komoditas ikan kembung, tuna dan udang. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman pengelola SPPG terkait penanganan serta pengolahan ikan yang baik, higienis, dan sesuai standar mutu dan keamanan pangan. Sebagai tindak lanjut yaitu dilakukan evaluasi kegiatan sebagai referensi kegiatan selanjutnya.



Gambar 56. Bimtek Penanganan dan Pengolahan Ikan di SPPG Sesi 2

4. *Forum Group Discussion (FGD) Pengembangan Kerangka Konseptual Analisis Proses Bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)*

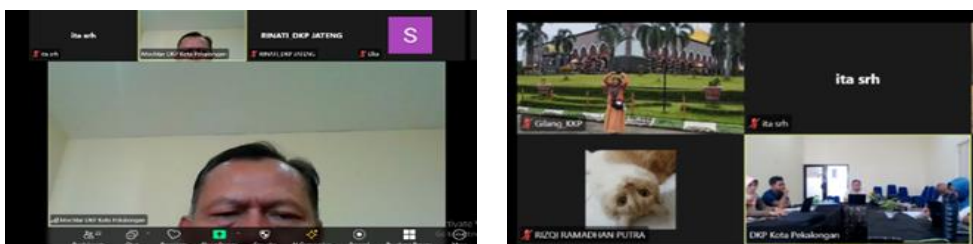
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2025 secara luring di Hotel AEONE, Jakarta. Kegiatan dipimpin oleh BGN dan PT Cakra Buana Consultant dan dihadiri oleh perwakilan dari Bapenas, Kementan, Kemendag, Kemenperin, KKP, BAPANAS, Kemenkop, Kemenkeu, Kemenkes, Kemenag, Kemendikdasmen, APJI, HIPMI, WFP, dan pakar dari IPB (Drajat Martianto) dan UGM (Elan Satriawan). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG, khususnya di tingkat SPP. Melakukan analisis keseluruhan proses bisnis program MBG termasuk mensintesa dan mengidentifikasi *Critical Point* serta mengembangkan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk mendukung penyempurnaan program secara berkelanjutan. Merumuskan langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem manajemen, standar mutu, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan program MBG. Kajian proses bisnis MBG ini merupakan pekerjaan yang kompleks dan tidak mudah, karena mencakup berbagai aspek mulai dari hulu hingga hilir, melibatkan dimensi sosial, ekonomi, regulasi, serta koordinasi lintas sektor dan daerah. Hasil dari FGD ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat dijadikan acuan nasional serta diuji coba pada beberapa wilayah untuk menyempurnakan model implementasi.



Gambar 57. *Forum Group Discussion (FGD)* Pengembangan Kerangka Konseptual Analisis Proses Bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

5. Pembinaan UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan

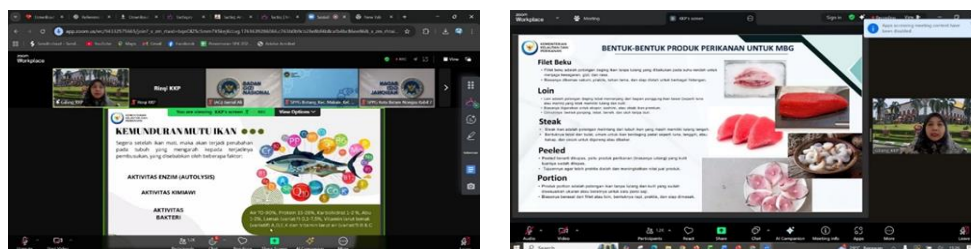
Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dipimpin oleh Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah dan dihadiri oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (KP) Kota Pekalongan, perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Perwakilan BPOM Jawa Tengah, perwakilan Pusat Pasca Panen BPPMHKP, perwakilan Eselon II Lingkup Ditjen PDSPKP serta Tim Teknis UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah progres kerja sama, kesiapan sarana dan prasarana, serta tindak lanjut sertifikasi dan produksi di Unit Pengolahan Ikan (UPI). Percepatan operasional UPI memerlukan finalisasi penetapan pengelola, pendampingan investor MIGI, perbaikan sarana prasarana, serta modifikasi peralatan produksi. Dengan pelaksanaan trial lanjutan sesuai standar KKP, penyelesaian sertifikasi, dan penguatan koordinasi lintas instansi, UPI diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal dan memenuhi standar mutu serta legalitas yang berlaku. Sebagai tindak lanjut akan dilakukan percepatan operasional UPI memerlukan finalisasi penetapan pengelola, pendampingan investor MIGI, perbaikan sarana prasarana, serta modifikasi peralatan produksi. Dengan pelaksanaan trial lanjutan sesuai standar KKP, penyelesaian sertifikasi, dan penguatan koordinasi lintas instansi, UPI diharapkan dapat segera beroperasi secara optimal dan memenuhi standar mutu serta legalitas yang berlaku.



Gambar 58. Pembinaan UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan

6. Sosialisasi Keamanan Pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Deputy Bidang Sistem dan Tata Kelola, dan dihasiri oleh seluruh perwakilan SPPG seluruh Indonesia. Narasumber kegiatan ini perwakilan dari Dit. Pengolahan yang diwakili oleh Ketua Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan, menyampaikan penerapan keamanan pangan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk meningkatkan kapasitas SDM SPPG terkait penerapan keamanan pangan dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memperkuat sistem ketahanan pangan nasional. Penerapan keamanan pangan secara konsisten menjadi kunci menjaga mutu gizi dan kesehatan penerima manfaat program MBG. Diperlukan pembiasaan praktik higienis di dapur SPPG serta pemahaman terhadap standar internasional keamanan pangan agar pengolahan pangan nasional semakin aman, bermutu, dan berkelanjutan.

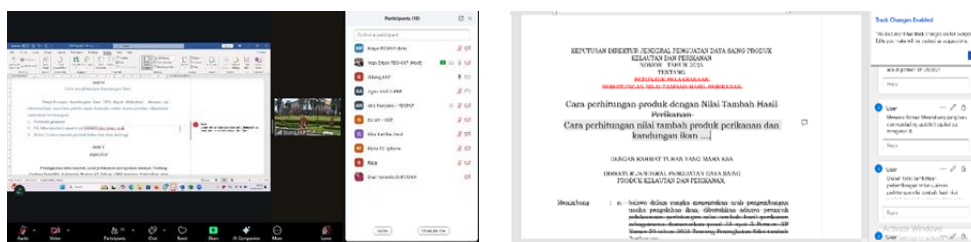


Gambar 59. Sosialisasi Keamanan Pangan bagi SPPG

7. Rapat Penyusunan Juknis Perhitungan Nilai Tambah

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 07 November 2025 secara daring melalui *zoom meeting*. Kegiatan dipimpin oleh Tim Kerja Pengembangan Diversifikasi dan Nilai Tambah dan dihadiri oleh Tim Kerja Pemetaan dan Analisis Pengolahan; Tim Kerja Pengembangan dan Penerapan Standar; Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Pangan; Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Non Pangan; Tim Kerja Pembinaan Pengolahan Hasil; Tim Kerja Pembinaan Mutu dan Keamanan Produk; serta Ketua Subbagian Tata Usaha. Lingkup Ditjen PDSPKP serta Tim Teknis UPI Nilai Tambah Kota Pekalongan. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah untuk menyelaraskan metodologi perhitungan nilai tambah produk kelautan dan perikanan. Direktorat Pengolahan melaksanakan kegiatan rapat koordinasi penyusunan petunjuk teknis

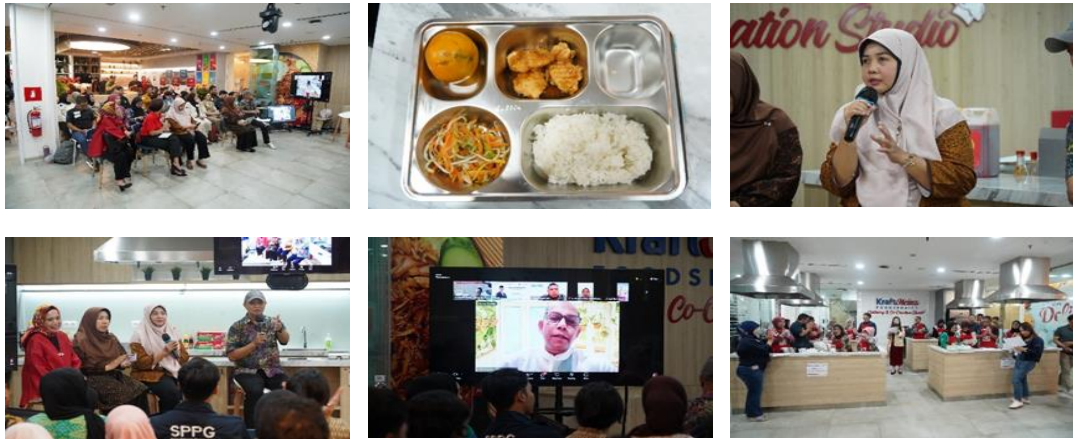
(juknis) perhitungan nilai tambah produk perikanan, sebagai dasar penyempurnaan Keputusan Dirjen PDSPKP.



Gambar 60. Rapat Penyusunan Juknis Perhitungan Nilai Tambah

8. Ngolah Ikan Bareng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 08 November 2025 secara *hybrid* di Menara Mandiri II Lantai 21 PT Heinz ABC Indonesia dan melalui *zoom meeting*. Kegiatan dibuka oleh Direktur Pengolahan dan dihadiri sebanyak 40 peserta luring berasal dari SPPG Jakarta, Bogor dan Bekasi, 606 peserta melalui *zoom meeting* dan 78 peserta melalui youtube, peserta tersebut berasal dari SPPG di 36 Provinsi, 278 Kabupaten/Kota. General Counsel and Head of Government Affairs PT Heinz ABC Indonesia juga memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa PT Heinz ABC Indonesia hadir menguatkan keamanan pangan, kualitas dan gizi untuk Masyarakat Indonesia. Tujuan dilaksanakannya kegiatan adalah Kegiatan ini merupakan lanjutan dari rangkaian kegiatan Bulan Bakti KP yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas meningkatkan kapasitas SDM dan pemahaman pengelola SPPG terkait penanganan serta pengolahan ikan yang baik, higienis, dan sesuai standar mutu dan keamanan pangan, khususnya pada komoditas nila dan sarden. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta PT. Heinz ABC Indonesia. Kegiatan dilanjutkan oleh Chef ABC (Chef Dede dan Chef Surya) dengan demo cara mengolah ikan nila dan sarden menjadi 2 menu bergizi dengan 4 tim SPPG yang sudah dibentuk. Kegiatan demo masak dilakukan dengan teknik memasak yang sederhana tetapi tetap menjaga kandungan protein dan cita rasa. Pentingnya kebersihan, ketepatan suhu, serta variasi resep agar menu ikan lebih menarik bagi anak-anak. pengelola SPPG diharapkan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menyajikan menu ikan yang tidak hanya lezat dan sehat, tetapi juga mudah diterapkan dalam program Makan Bergizi Gratis.



Gambar 61. Ngolah Ikan Bareng Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG)

9. Rapat Koordinasi Terbatas (RAKORTAS) Badan Gizi Nasional

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2025. Kegiatan dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan dan dihadiri oleh Menteri Koperasi, Kepala Badan Gizi Nasional dan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Menteri Desa, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perwakilan Kementerian/Lembaga serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diwakili oleh Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Direktur Pemberdayaan Usaha Ditjen PDSPKP beserta perwakilan Ditjen PDSPKP lain serta Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Kajiskan). Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk melakukan *kick off meeting* Perpres 115/2025 tentang percepatan tata kelola MBG dengan anggota sebanyak 26 Kementerian/Lembaga. Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan penguatan tata kelola, penyesuaian regulasi, serta kolaborasi lintas kementerian/lembaga untuk mencapai target pembangunan SPPG hingga Maret 2026. KKP berperan penting dalam penyediaan ikan sebagai sumber protein hewani, sementara pemanfaatan lembaga ekonomi desa dan percepatan pembangunan SPPG di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) menjadi langkah strategis agar program berjalan efektif dan merata.

10. Pembuatan design buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan tahun 2025 dan katalog resep workshop serta lomba

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5-7 Desember 2025. Pembuatan design buku disusun oleh Tim kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan, mencakup katalog resep kegiatan workshop, katalog resep lomba, dan buku diversifikasi

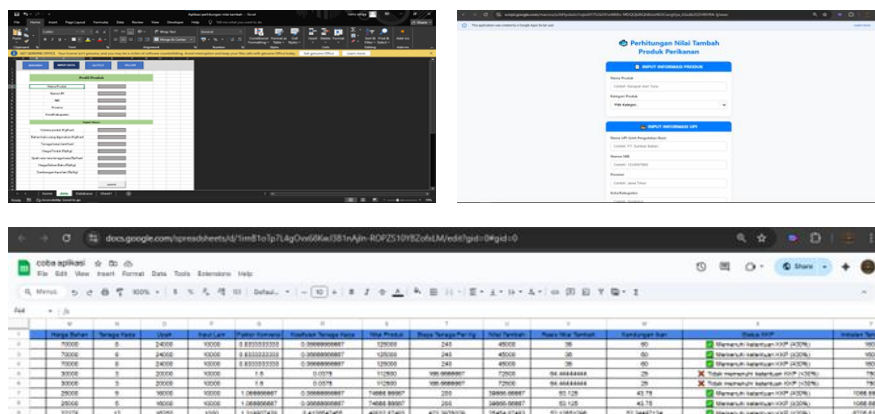
produk pangan hasil perikanan. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah pembuatan katalog dan buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan disusun sebagai bahan untuk publikasi dan paparan hasil kegiatan workshop yang telah dilakukan pada satu tahun masa kerja di tahun 2025. Pembuatan desain katalog dan buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan yang telah selesai disusun sebagai bahan publikasi hasil kegiatan tahun 2025. Selanjutnya, diperlukan penyempurnaan melalui perbaikan sesuai revisi serta percepatan penyelesaian desain katalog lomba dan buku diversifikasi agar seluruh output dapat segera dimanfaatkan secara optimal.



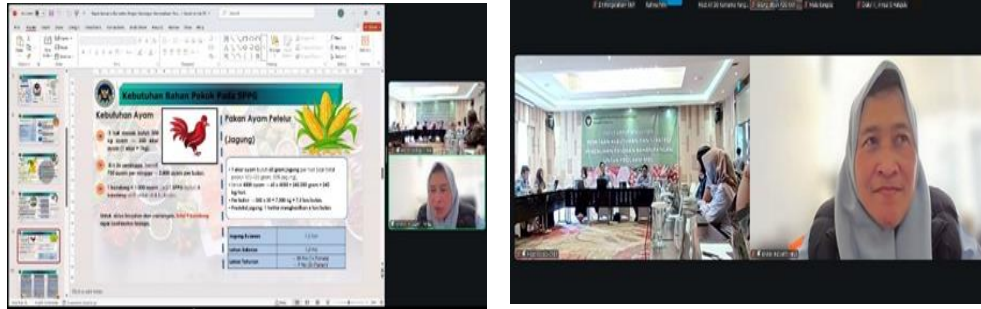
Gambar 62. Pembuatan design buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan tahun 2025 dan katalog resep workshop serta lomba

11. Pembuatan Website/Aplikasi Perhitungan Nilai Tambah Produk Perikanan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2025. Pembuatan Website/Aplikasi Perhitungan Nilai Tambah Produk Perikanan disusun oleh Tim kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan, mencakup katalogh resep kegiatan workshop, katalog resep lomba, dan buku diversifikasi produk pangan hasil perikanan. . Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah untuk perhitungan nilai tambahn 2026 untuk produk kelautan dan perikanan Pembuatan website/aplikasi perhitungan nilai tambah produk perikanan oleh Tim Kerja Diversifikasi dan Inovasi Produk Pangan telah berjalan bertahap, dimulai dari penyusunan desain dan formula perhitungan di Excel hingga penerapannya ke Google Spreadsheet yang dapat diakses secara online. Proses pengembangan dilanjutkan dengan perancangan aplikasi berbasis Apps Script, penyesuaian komponen input sesuai kebutuhan UPI/UMKM, penambahan komponen kandungan ikan minimal 30%, serta penyempurnaan desain dan perbaikan error sistem. Dengan tahapan tersebut, aplikasi diharapkan siap digunakan sebagai alat bantu perhitungan nilai tambah produk perikanan secara lebih akurat dan mudah diakses.



12. Focus Group Discussion (FGD) Pemetaan Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Pasokan Bahan Pangan pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG)



Gambar 64. *Focus Group Discussion* (FGD) Pemetaan Kebutuhan dan Strategi Pemenuhan Pasokan Bahan Pangan pada Program MBG

13. Laporan *Forum Group Discussion* (FGD) Kebijakan, Strategi dan Roadmap Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ke Depan

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 di Hotel Habitare Rasuna, Jakarta. Kegiatan FGD dibuka oleh Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian BPN Bapenas, dan FGD dipimpin oleh Tenaga Ahli Kebijakan Publik Tim Konsultan PT Cakra Buana Consultan. Peserta FGD diantaranya Bapenas, Kemnko Pangan, Kementan, Kemenkes, KKP, Kemenkop, Dinkes DKI Jakarta, dan Guru Besar Universitas Tadulako, Sulawesi Tengah. Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah Memetakan permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program MBG, melakukan analisis keseluruhan proses bisnis program MBG termasuk mensintesa dan mengidentifikasi Critical Critical Point serta mengembangkan rekomendasi dan strategi perbaikan untuk mendukung penyempurnaan program secara berkelanjutan dan merumuskan langkah strategis dan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sistem manajemen, standar mutu, serta mekanisme evaluasi dan pelaporan program MBG. Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih memerlukan penguatan signifikan pada aspek kelembagaan, tata kelola, kepatuhan regulasi, dan proses bisnis agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam kerangka Perpres Nomor 115 Tahun 2025, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Pengolahan berperan strategis dalam mendukung penyediaan ikan sebagai sumber protein hewani yang aman, bermutu, dan berkelanjutan, melalui bimtek, rekomendasi bahan baku siap olah, serta penguatan kolaborasi dengan pelaku usaha perikanan. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat MBG, tetapi juga mendorong efisiensi operasional SPPG serta memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.



Gambar 65. Laporan *Forum Group Discussion* (FGD) Kebijakan, Strategi dan Roadmap Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Ke Depan

Tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan pada triwulan sebelumnya yaitu, telah dilaksanakan pembinaan pelaku usaha yang dilaksanakan Bulan Oktober dan Desember 2025 dan dilakukan pengisian kuesioner online kepada Dinas untuk mengetahui pelaku usaha yang telah menerapkan hasil pelatihan dalam kegiatan usahanya, pembinaan UPI Nilai Tambah Pekalongan yang dilaksanakan pada 24 Oktober 2025, fasilitasi desain kemasan kepada 10 UMKM pelaku usaha ikan asin pada tanggal 5-7 Desember 2025, pembuatan desain katalog resep workshop serta lomba untuk fasilitasi UMKM pada Tanggal 5-7 Desember 2025.

❖ **Pengarusutamaan Gender**

Direktorat Pengolahan melaksanakan kegiatan pengembangan diversifikasi produk kelautan dan perikanan memperhatikan kesetaraan dan keterlibatan gender peserta secara inklusif, sehingga seluruh peserta, baik perempuan maupun laki-laki, memperoleh kesempatan yang setara dalam peningkatan kapasitas, akses pengetahuan, dan pemanfaatan peluang usaha. Target pelaku usaha yang dibina pada Tahun 2025 sebanyak 500 pelaku usaha dengan proporsi gender 232 (46%) laki laki dan 268 (56%) Perempuan melalui kegiatan workshop pengembangan diversifikasi dan nilai tambah yang dilaksanakan setiap bulan pada Bulan Januari-Desember 2025. Dengan demikian Dit. Pengolahan telah mencapai output sesuai target yang ditetapkan.

Terlaksananya Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya lingkup Direktorat Pengolahan

IK 3. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit kerja Direktorat Pengolahan sampai dengan waktu pengukuran.

Tabel 5. Ikhtisar Pencapaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Pertumbuhan Year on Year
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2025	95	100	105.26	85	89	100	118	112	11.77
	2024	80	89.47	111.84						-10.53
	2023	75	100	133.33						0
	2022	70	100	142.86						-0
	2021	65	100	153.85						0

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan* Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik dan secara umum melampaui target tahunan. Pada Tahun 2021, realisasi mencapai 100% atau 153,85% terhadap target. Capaian tersebut dipertahankan pada Tahun 2022 dan 2023 dengan realisasi masing-masing sebesar 100%, dengan tingkat capaian terhadap target sebesar 142,86% dan 133,33%.

Pada Tahun 2024, realisasi mengalami penurunan menjadi 89,47% atau 111,84% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar -10,53% dibandingkan Tahun 2023. Namun demikian, pada Tahun 2025 realisasi kembali meningkat menjadi 100% atau 105,26% terhadap target tahunan, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 11,77%. Hal ini menunjukkan adanya pemulihan kinerja dan penguatan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan.

Secara kumulatif terhadap Target Renstra Tahun 2025 sebesar 85%, realisasi hingga Tahun 2025 telah mencapai sekitar 118%. Sementara terhadap Target Renstra

Tahun 2029 sebesar 89%, capaian telah mencapai sekitar 112%. Dengan demikian, indikator ini telah melampaui target strategis jangka menengah maupun target akhir periode, yang menunjukkan komitmen dan efektivitas dalam pemanfaatan hasil pengawasan sebagai instrumen perbaikan kinerja organisasi.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan IV 2025, antara lain: melakukan pengisian pemenuhan dokumen temuan pada aplikasi Sidak, melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 4. Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024 yang telah ditindak lanjuti dibanding jumlah nilai temuan hasil pemeriksaan BPK atas penggunaan anggaran pada laporan keuangan Direktorat Pengolahan Tahun 2024.

Tabel 6. Ikhtisar Pencapaian Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Pertumbuhan YoY
Persentase Penyelesaian Temuan BPK Lingkup Direktorat Pengolahan	2025	100	100	100.00	100	100	100	100	100	0
	2024	100	100	100.00						0
	2023	100	100	100.00						33.33
	2022	75	75	100.00						-25.00
	2021	75	100	133.33						0

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkup Direktorat Pengolahan* Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat penyelesaian yang pada sebagian besar tahun mencapai 100%. Pada Tahun 2021, realisasi tercatat sebesar

100% atau 133,33% terhadap target. Pada Tahun 2022, realisasi menurun menjadi 75% atau 100% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar -25,00% dibandingkan Tahun 2021.

Pada Tahun 2023, realisasi kembali meningkat menjadi 100% atau 100% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 33,33%. Selanjutnya pada Tahun 2024 dan Tahun 2025, realisasi tetap stabil pada angka 100%, dengan pertumbuhan year-on-year masing-masing sebesar 0,00%. Stabilitas ini menunjukkan bahwa mekanisme tindak lanjut hasil pemeriksaan telah berjalan secara konsisten dan efektif.

Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2025 dan Target Renstra Tahun 2029 yang masing-masing ditetapkan sebesar 100%, realisasi hingga Tahun 2025 telah mencapai 100%. Dengan demikian, indikator ini telah sepenuhnya memenuhi target strategis jangka menengah maupun target akhir periode perencanaan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan antara lain:

1. Pemenuhan Dokumen Tindak Lanjut Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan;
2. Melakukan monitoring lapangan sesuai dengan rekomendasi sebagai bentuk dari tindak lanjut temuan. Sementara itu belum ada kendala dalam pelaksanaan kegiatan ini.

IK 5. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.

Nilai PM SAKIP Unit Eselon I dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP

dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal.

Tabel 7. Ikhtisar Pencapaian Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Pertumbuhan Year on Year
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2025	86.00	87.20	101.40	86	86,8	87.20	101	100,4	3.81
	2024	84.00	84.00	100.00						- 2.67
	2023	80.5	86.3	107.20						
	2022									
	2021									

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan* Tahun 2023–2025, realisasi kinerja menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap berada di atas target tahunan. Pada Tahun 2023, realisasi tercatat sebesar 86,3 atau 107,20% terhadap target yang ditetapkan.

Pada Tahun 2024, realisasi menurun menjadi 84,0 atau 100,00% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar -2,67% dibandingkan Tahun 2023. Meskipun mengalami penurunan, capaian tetap memenuhi target tahunan yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada Tahun 2025, realisasi kembali meningkat menjadi 87,20 atau 101,40% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 3,81%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas implementasi SAKIP pada tahun berjalan.

Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2025 sebesar 86, realisasi hingga Tahun 2025 telah mencapai 101,40%. Sementara terhadap Target Renstra Tahun 2029 sebesar 86,8, capaian telah mencapai sekitar 100,4%. Dengan demikian, indikator ini telah melampaui target strategis baik jangka menengah maupun target akhir periode perencanaan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Di Lingkungan Direktorat Pengolahan pada Triwulan IV antara lain:

1. Mengikuti rapat Pemantauan Kegiatan Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 3-4 Juli 2025

2. Pengisian evaluasi rencana aksi Level 1 dan 2 lingkup Direktorat Jenderal PDSPKP Periode Triwulan III Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2025.
3. Monitoring Pelaksanaan Bantuan Pemerintah/ Kegiatan Prioritas Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2025.
4. Pemantauan Kegiatan Mendukung Kebijakan Ekonomi Biru Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2025.

IK 6. Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Tabel 8. Ikhtisar Pencapaian Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan

Indikator Kinerja	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Realisasi Terhadap Target	Target Renstra 2025	Target Renstra 2029	Realisasi s.d. 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2025	Persentase Realisasi s.d. 2025 terhadap Target Renstra 2029	Pertumbuhan Year on Year
Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan	2025	81	85.97	106.14	81	83	85.97	106	103,6	-2.42
	2024	87.00	88.10	101.26						- 4.38
	2023	83.2	92.14	110.75						5.36
	2022	83	87.45	105.36						0.80
	2021	73	86.76	118.85						

Berdasarkan data capaian indikator kinerja *Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan* Tahun 2021–2025, realisasi kinerja menunjukkan

dinamika yang fluktuatif namun secara umum tetap berada di atas target tahunan. Pada Tahun 2021, realisasi tercatat sebesar 86,76 atau 118,85% terhadap target. Selanjutnya pada Tahun 2022, realisasi meningkat menjadi 87,45 atau 105,36% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar 0,80%.

Peningkatan yang lebih signifikan terjadi pada Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 92,14 atau 110,75% terhadap target, serta pertumbuhan year-on-year sebesar 5,36%. Namun demikian, pada Tahun 2024 realisasi menurun menjadi 88,10 atau 101,26% terhadap target, dengan pertumbuhan year-on-year sebesar -4,38%. Tren penurunan berlanjut pada Tahun 2025 dengan realisasi sebesar 85,97 atau 106,14% terhadap target, serta pertumbuhan year-on-year sebesar -2,42%.

Apabila dibandingkan dengan Target Renstra Tahun 2025 sebesar 81, capaian hingga Tahun 2025 telah mencapai sekitar 106%. Sementara terhadap Target Renstra Tahun 2029 sebesar 83, realisasi telah mencapai sekitar 103,6%. Dengan demikian, indikator ini telah melampaui target strategis baik jangka menengah maupun target akhir periode perencanaan.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi pertumbuhan pada dua tahun terakhir, tingkat Indeks Profesionalitas ASN tetap berada pada level yang melampaui target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pengembangan kompetensi, kinerja, dan tata kelola ASN tetap terjaga dan berada dalam koridor capaian yang diharapkan.

Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka mendukung capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Dilingkungan Direktorat Pengolahan pada triwulan IV antara lain:

1. Melakukan pemantauan nilai IP ASN Organisasi,
2. Melakukan penginputan sertifikat dari kegiatan diklat maupun pelatihan yang telah diikuti oleh seluruh pegawai pada aplikasi e-pegawai,
3. Melakukan rekap data pegawai yang telah mengikuti diklat maupun pelatihan.

3.3. Realisasi Anggaran

Berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-980/AG.3/2025 tanggal 19 November 2025 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan serta berdasarkan Perjanjian Kinerja tertanggal 8 Desember 2025, Direktorat Pengolahan mendapatkan alokasi

anggaran sebesar Rp 777.142.000,- dengan realisasi sampai dengan Desember 2025 sebesar Rp 777.030.114,- atau setara dengan 99,99%. Direktorat Pengolahan dapat melakukan efisiensi anggaran dimana realisasi NKO sebesar 101,71% dibandingkan dengan realisasi anggaran sebesar 99,99 sehingga terdapat efisiensi sebesar 1,72%.

Tabel 9. Realisasi Anggaran Direktorat Pengolahan Triwulan IV 2025

No	Rincian Output	Pagu	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran
1	Persentase Utilitas industri pengolahan produk KP	422.164.000	44.082	99,99%
2	Volume Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	354.978.000	67.804	99,98%

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Direktorat Pengolahan dari Januari sampai dengan Desember 2025. Nilai pencapaian sasaran strategis Direktorat Pengolahan berdasarkan aplikasi kinerja pada Tahun 2025 sebesar 101,71. Jika dibandingkan dengan capaian triwulan IV tahun 2024 terdapat penurunan sebesar 1,282 poin atau -1,24%. Penurunan Nilai Capaian Sasaran Kegiatan triwulan IV 2025 dikarenakan berkurangnya 5 IKU dan munculnya 1 IKU baru. Pencapaian nilai kinerja organisasi periode sampai dengan Triwulan IV diperoleh dari indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

- IKK Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (%); target 68,70%; capaian 68,72% (prognosa) atau 100,03% dari target.
- IKK Volume Produksi Olahan Perikanan; target 3,71 juta ton; capaian 3,783 juta ton (prognosa) atau 101,89% dari target.
- IKK Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (%); target 95%; capaian 100% atau 105,26% dari target.
- IKK Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 100%; capaian 100% atau 100% dari target.
- IKK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan; target 86,00; capaian 87,20 atau 101,40% dari target.
- IKK Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks); target 81,00; capaian 85,97 atau 106,14% dari target.

Akhirnya, kehadiran Laporan Kinerja Direktorat Pengolahan Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, Laporan Kinerja ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

4.2. Permasalahan dan Rekomendasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian pada triwulan IV 2025, yaitu:

Indikator Kinerja	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	Masih terbatasnya data pihak penerima pemanfaatan produk samping yang dihasilkan dari UPI, dimana data tersebut dapat digunakan sebagai salah satu referensi pelaksanaan profiling <i>food loss and waste</i> (FLW).	Melakukan koordinasi lanjutan dengan UPI dan Dinas dalam pendataan profiling FLW

4.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Pada Laporan Kinerja Triwulan Sebelumnya Tahun 2025

Sementara itu, rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2025 yang telah ditindak lanjuti sebagai berikut :

Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut pada Triwulan III Tahun 2025	Tindak Lanjut
Pemberian pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha difasilitasi melalui edukasi (penyebarluasan informasi melalui media sosial, kegiatan klinik mutu di bazar atau sosialisasi) dan pembinaan langsung kepada pelaku usaha perikanan.	Pendampingan lanjutan penerapan GMP, SSOP, dan sertifikasi bagi UPI skala mikro dan kecil yang telah menunjukkan progres pembinaan, replikasi dan validasi teknologi pengolahan seperti <i>Solar Dryer Dome</i> (SDD) untuk peningkatan mutu dan efisiensi produksi serta kemasan,

	percepatan dan penuntasan pendataan Volume Produk Olahan (VPO) melalui penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta konsolidasi hasil pembinaan ke dalam perencanaan kebijakan dan pengembangan standar.
• Perlu koordinasi lebih lanjut dengan BPPMHKP dan BKI dalam sinkronisasi data sebagai dasar penghitungan VPO dan Utilitas UPI MB. • Pembaharuan data kapasitas terpasang UPI MB serta penghitungan prognosa capaian VPO dan Utilitas MB.	• Telah dilaksanakan kegiatan koordinasi Penghitungan Volume Produk Olahan Unit Pengolahan Ikan Menengah dan Besar tahun 2025, dilaksanakan pada tanggal 18 November 2025. Dalam kegiatan tersebut dihadiri juga oleh perwakilan dari BPPMHKP dan BKI, sehingga dapat dilakukan analisis atas hasil penghitungan sementara VPO UPI MB, review terhadap metode penghitungan yang dilakukan, serta koordinasi pemenuhan data. • Dilaksanakannya pembahasan progress penghitungan VPO Unit Pengolahan Ikan skala Menengah dan Besar TW III Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 14 dan 21 Oktober 2025

Bukti tindak lanjut rekomendasi pada Laporan Kinerja triwulan IV tahun 2025 dapat dilihat pada tautan SAKIP dengan folder Level 2 PBM (<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fn4970bC3dZvZ1q-qyIYENfkEz9hHZnr>).

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggungjawaban kepada stakeholders dan pemacu peningkatan kinerja bagi organisasi Direktorat Pengolahan, Ditjen PDSPKP. Terima kasih kami sampaikan semoga laporan ini bermanfaat bagi para pembaca dalam memperkaya pengetahuan tentang pengolahan dan bina mutu di sektor kelautan dan perikanan. Laporan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dalam rangka perbaikan dan penyusunan kegiatan Direktorat Pengolahan selanjutnya. Namun kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran dan masukan konstruktif dari pihak-pihak terkahit sebagai bahan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Saran dapat disampaikan melalui email: direktoratpbm@gmail.com. Demikian atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

4.4. Lampiran



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING
PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3500132
LAMAR www.kkp.go.id SUREL persuratan.pds@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Tri Aris Wibowo**
Jabatan : Direktur Pengolahan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Machmud**
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan

Machmud

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan

Tri Aris Wibowo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT PENGOLAHAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
1.	Meningkatnya Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan	1.	Persentase Utilitas Industri Pengolahan Produk Kelautan dan Perikanan (Persen)	68,70
2.	Meningkatnya Produksi Olahan Kelautan dan Perikanan	2.	Volume Produksi Olahan Perikanan (Juta Ton)	3,71
3.	Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Akuntabel dalam Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	3.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	95
		4.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Persen)	100
		5.	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Nilai)	86
		6.	Indeks Profesionalitas ASN di Lingkungan Direktorat Pengolahan (Indeks)	81

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
PROGRAM : Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	777.142.000
Total Anggaran Direktorat Pengolahan Tahun 2025	777.142.000

Jakarta, 8 Desember 2025

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya
Saing Produk Kelautan dan Perikanan



Machmud

Pihak Kesatu,
Direktur Pengolahan



Tri Aris Wibowo

